

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan dan Diplomasi Alutsista TNI Orde Lama hingga Reformasi

4.1.1 Orde Lama

Setelah mendapatkan pengakuan kedaulatan dari pemerintah Kerajaan Belanda pada 1950 tidak serta merta menamatkan episode perlawanan melawan penjajah. Indonesia pada rentang 1960-1964 menghadapi ancaman kedaulatan dari wilayah paling utara dan timur Indonesia. Sebuah upaya perebutan wilayah ini nantinya akan dikenal sebagai operasi Trikora dan Dwikora. Yang menarik untuk ditelisik dari kedua peristiwa ini adalah upaya dari pemerintah Orde Lama pada saat itu untuk melakukan peremajaan dan peningkatan kapasitas angkatan bersenjata Republik Indonesia. Upaya-upaya tersebut banyak dilakukan langsung oleh presiden pertama sekaligus penguasa Orde Lama Ir Soekarno dengan melakukan lawatan dan diplomasi pertahanan ke berbagai negara. Salah satu upaya diplomasi yang paling monumental adalah pembelian besar-besaran alutsista paling mutakhir dijamannya yang diperoleh dari negara blok timur Uni Soviet.

Presiden Sukarno gusar begitu mendengar kapal induk Belanda, Karel Doorman memasuki Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Belanda makin panas menuju ke arah perang. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Abdul Ahris Nasution merangkap Menteri Pertahanan, dipanggil menghadap Sukarno. Di Istana Negara, sebuah misi terucap dari Bung Karno. Dalam memoarnya Nasution mengingat pembicaraan itu berlangsung sekira akhir November atau awal Desember 1960. Nasution diperintahkan untuk mengatur segala rencana akuisisi beberapa alutsista mutakhir dari Uni Soviet. Bagi Nasution, order itu ibarat menjilat ludah sendiri. Pemerintah Uni Soviet sebelumnya telah menawarkan bantuan militer untuk menjual alat utama sistem persenjataanya kepada Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev dalam lawatannya ke Indonesia pada Februari 1960. Namun atas permintaan Angkatan Darat, tawaran Khrushchev ditanggihkan.

Nasution masih berkeyakinan senjata berat yang dibutuhkan dapat diperoleh dari Amerika Serikat (AS).

“PM Khrushchev membuka jalan untuk pembelian senjata bagi TNI. Tapi saya mendahulukan untuk memperoleh di AS” ujar Nasution.¹

Pada Oktober 1960, Nasution mencoba melobi AS untuk memperoleh senjata berat ofensif. Alhasil Nasution pulang dengan tangan hampa. Presiden Eisenhower enggan menjual persenjataannya kepada Indonesia lantaran terikat persekutuan dengan Belanda dalam NATO. Bagi presiden Sukarno tiba saatnya menempatkan Uni Soviet sebagai kekuatan penyeimbang. Jenderal Nasution diutus ke Moskow pada akhir Desember 1960. Selama seminggu proses negosiasi, persetujuan senjata berhasil rampung pada 6 Januari 1961. Diplomat kawakan Ganis Harsono dalam Cakrawala Politik Era Sukarno mencatat kerjasama militer itu tertera dalam piagam “untuk membela perdamaian dan persaudaraan di Asia Tenggara”.

Di Moskow, Nasution mendapat pelayanan yang menyenangkan dari pemerintah Uni Soviet. Kesempatan berpidato di Istana Kremlin digunakan Nasution untuk menyatakan terimakasih. Nasution juga mengapresiasi sikap bersahabat yang ditunjukkan oleh Nikita Khrushchev terhadap dirinya. Misi Nasution pulang ke Indonesia dengan membawa peralatan tempur senilai \$ 450 juta. Mekanisme pembayaran dilakukan secara kredit berjangka 20 tahun dengan bunga 2,5 persen. Kebutuhan Angkatan Laut dan Angkatan Udara menempati slot utama dalam agenda pembelian tersebut. “yang terbesar ialah untuk AL, termasuk 12 kapal selam, belasan kapal roket cepat, pesawat-pesawat AL, helikopter-helikopter dan peralatan amfibi untuk KKO kurang lebih 3 resimen” ungkap Nasution

Angkatan Udara memperoleh pesawat jet tempur, pesawat pembom, dan sistem pertahanan udara beserta radarnya. Sedangkan untuk Angkatan Darat terbatas pada tank dan perlengkapan artileri. Kontrak tersebut masih akan terus disesuaikan kebutuhannya untuk satu semester ke depan. Peralannya, sistem persenjataan Soviet yang dialihkan untuk Indonesia memerlukan waktu dalam operasioanalnya yang meliputi : proses pengiriman, persiapan

¹ Sitompul, Martin. “Jenderal Nasution dan Senjata Uni Soviet”.2018.
<https://historia.id/politik/articles/jenderal-nasution-dan-senjata-uni-soviet-v2e25/page/1>.

pangkalan udara dan laut, serta pelatihan teknisi. Oleh karenanya, Indonesia masih terikat untuk melanjutkan pembelian senjata dari Uni Soviet pada bulan Juni 1961.

Walaupun belum siap tempur, persenjataan dari Uni Soviet memberi suntikan moral bagi Angkatan Perang Indonesia. Menurut Johannes Djiwandono dalam *Konfrontasi Revisited : Indonesia Foreign Policy Under Soekarno*, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang memperoleh senjata berat termutakhir dari Uni Soviet. Beberapa diantaranya seperti pesawat bomber jarak menengah TU-16 dan pesawat jet tempur MIG-21. Untuk mengimbangi Kareel Doorman, Indonesia memesan sebuah kapal penjelajah Soviet yang kemudian dinamai KRI Irian berbobot 16640 ton. Tak ayal lagi, kekuatan militer Indonesia pada saat itu merupakan yang terkuat di belahan bumi bagian selatan.

Keberhasilan misi Nasution berdampak besar terhadap pertarungan Perang Dingin. Pengaruh Soviet kian menguat di tubuh Angkatan Perang Indonesia. Pimpinan Angkatan Darat seperti Nasution yang antikomunis sekalipun bersimpati atas jasa Soviet memodernisasi TNI. Bantuan militer Soviet secara signifikan telah memperkuat posisi Moskow di Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia, dan perwira-perwira Angkatan Darat di Jawa seperti Nasution, yang sudah lama mencurigai dukungan Amerika Serikat kepada PRRI.²

Di sisi lain, peran Soviet di Indonesia membuat Presiden AS John F. Kennedy yang baru terpilih jadi gelisah. Pemerintah Sukarno yang condong ke blok Soviet mulai memaksa AS untuk ikut ambil bagian dalam konflik Irian Barat. Gedung Putih hanya akan dihadapkan pada dua pilihan : Indonesia atau Belanda. Penembakan pesawat tempur milih AUREV-Permesta yang dipiloti oleh seorang agen CIA Allen Pope turut menjadi bagian dari dinamika diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Bung Karno. Saat itu pesawat yang dipiloti Allen Pope berhasil ditembak jatuh oleh Kapten Udara Penerbang Dewanto dalam pertempuran udara. Presiden Amerika John F. Kennedy menawarkan “pengganti” Pope kepada Sukarno. Angkatan Udara saat itu memerlukan pengganti pesawat transporter de Havilland Canada dan DHC-4 Caribou. Pilihan kemudian jatuh kepada Hercules C-130B.

² Martin, Sitompul. "Jenderal Nas dan Kamerad Khrushchev. 2019. <https://historia.id/histeria/articles/jenderal-nas-dan-kamerad-khrushchev-DAd1w/page/1>

saat itu Sukarno datang ke pabrik Lockheed, produsen Hercules C-130, akhirnya, 10 unit C-130B bisa diterbangkan dengan proses penerbangan feri (*ferry flight*) dari AS ke Tanah Air.³

Saat itu, 10 unit C-130B menjadikan Indonesia seagai operator terbanyak Hercules C-130B di belahan selatan dunia pada kemudian hari. C-130B ketika itu menjadi pesawat multiengine perdana di Tanah Air yang berteknologi turboprop, suatu lompatan teknologi penting dan besar yang ternyata bisa cepat dikuasai oleh putra-putra bangsa. Disebabkan jumlahnya yang cukup banyak, pada 19 februari 1962, didirikanlah Skuadron Udara 31 angkut berat, diikuti Skuadron Udara 32 pada 29 Desember 1965.

4.1.2 Orde baru

Semasa awal 1970-an hingga akhir 1970-an, bisa dikatakan kekuatan udara Indonesia nyaris lumpuh karena ketiadaan suku cadang akibat terganggunya hubungan dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Di dalam negeri, konsolidasi kekuatan rezim Soeharto yang berbasiskan TNI Angkatan Darat berusaha meredam kekuatan Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang dikenal memiliki banyak elemen pendukung rezim Soekarno.

"Pesawat MiG-21 akhirnya di-grounded setelah terjadi beberapa kali kecelakaan. Sesudah itu, pada 1970-an sempat didatangkan hibah pesawat F-86 Sabre eks RAAF Australia dan pesawat latih T-33 dari Amerika Serikat untuk menjaga kemampuan terbang para penerbang TNI AU. Kondisi memang sangat memprihatinkan ketika itu. Pada Operasi Seroja di Timor-Timur 1976 masih dioperasikan pesawat tua, termasuk B-25 Mitchell dan pesawat-pesawat tua Dakota untuk mendukung operasi tempur," Ujar Didi Sejarawan Yayasan Nation Building.⁴

Akhirnya, menjelang dekade 1970-an, meski ada tekanan internasional terkait dengan operasi militer di Timor-Timur, Soeharto berhasil meyakinkan Amerika Serikat

³ Hakim, Rachmat."Pertama Kalinya C-130 Jadi Bagian Alutsista TNI AU.2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/18/21561121/hari-ini-dalam-sejarah-pertama-kalinya-pesawat-hercules-c-130-jadi-bagian>

⁴ Santosa, Iwan."F-5 Tiger Pertahanan Udara Orde Baru".2015.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/25/15100061/F-5E.Tiger.Pertahanan.Udara.Orde.Baru>

untuk mendapat dukungan persenjataan, termasuk jet-jet tempur. Hadirlah jet tempur yang ditampilkan dalam parade Hari ABRI pertama kali-dan belum pernah terulang-di Jalan Tol Jagorawi, 5 Oktober 1980, jet tempur F-5E yang dibeli baru dari Amerika Serikat dan jet tempur A4-E Skyhawk (Skuadron Udara 11) bekas pakai yang dibeli dari Israel hasil Operasi Alpha yang diungkap dalam buku terbitan TNI AU, Elang Tanah Air di Kaki Lawu: Sejarah Pangkalan Udara Iswahjudi, 1939-2003. F-5E dirancang sejak medio 1950-an oleh pabrikan Northrop. Pesawat dengan persenjataan dua kanon 20 milimeter M39 serta bom dan rudal AIM-9 Sidewinder yang legendaris. Pesawat-pesawat F-5E Tiger datang dengan diangkut pesawat angkut raksasa C-5A Galaxy yang mendarat di Lanud Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur, 21 April 1980. Teknisi Amerika Serikat melatih teknisi TNI AU. Pelatihan kepada penerbang TNI AU di Amerika Serikat dimulai dengan kehadiran mereka sejak 5 Desember 1979 dan 19 Januari 1980 di Lanud Williams di Negara Bagian Arizona. Sebanyak 16 unit atau satu skuadron penuh F-5E dimiliki TNI AU. Operator F-5E adalah Skuadron Udara 14 yang sebelumnya mengoperasikan MiG-21 (1962-1970) dan F-86 Sabre (1974-1980). F-86 Sabre dikenal kiprahnya dalam Perang Korea (1950-1953) dan F-5E Tiger termasyhur dalam Perang Vietnam yang dioperasikan Amerika Serikat dan sekutunya, Vietnam Selatan. Wakil Asisten Operasi KSAU Marsekal Pertama Yuyu Sutisna, yang lama mengawaki F-5E Tiger, mengaku, pesawat tersebut membutuhkan keahlian khusus untuk mengendalikannya karena kecepatannya tinggi. "Bentuknya sangat ramping sehingga kecepatannya tinggi dan harus pas mengatur pendaratan. Sangat mudah terjadi over shoot-melewati pendaratan-sehingga pesawat celaka," kata Yuyu yang sempat berlatih dengan sesama penerbang F-5E Tiger dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Memang, bentuk *fuselage* badan pesawat Tiger-mirip dengan F-104 Starfighter yang dijuluki "*widow maker*" karena sering mengalami kecelakaan yang menewaskan penerbang yang mengawaki Starfighter, lama digunakan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Secara fisik, pesawat berbentuk mirip pensil terbang yang memiliki panjang 14,45 meter dan lebar bentang sayap 8,13 meter itu memiliki kecepatan terbang 940 knot atau 1,5 kali kecepatan suara.⁵

Mulai dasawarsa 1980-an kapal-kapal perang TNI AL buatan Eropa Timur yang telah menjadi inti kekuatan TNI AL era 1960 dan 1970-an dinilai sudah tidak memenuhi

⁵ ibid

tuntutan tugas TNI AL. Memburuknya hubungan RI Uni Soviet pasca pemerintahan Presiden Soekarno membuat TNI AL mengadopsi teknologi Barat diantaranya Korvet berpeluru kendali kelas 'Fatahillah' dari Belanda, Fregat berpeluru kendali kelas '*Van Speijk*' eks AL Belanda, Kapal selam kelas 209/1300 buatan Jerman Barat, Kapal tempur cepat berpeluru kendali kelas '*Patrol Ship Killer*' buatan Korea Selatan, dan Pesawat Patroli Maritim '*Nomad-Searchmaster*' eks-Angkatan Bersenjata Australia. Pada tahun 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal-kapal perang jenis korvet klas '*Parchim*', kapal pendarat tank (LST) kelas '*Frosch*', dan penyapu ranjau kelas Kondo Bagi Angkatan Udara, pada awal 1970, dikenang sebagai tahun pemusnahan persenjataan Blok Timur sehingga merupakan tahun paceklik buat kekuatan udara pasca dikandangkannya pesawat Blok Timur yang menggetarkan dunia.

Di era itu AURI hanya mempunyai jenis pesawat angkut, latihan, dan heli serta beberapa pesawat tempur tanpa gigi selain OV-10F Bronco yang datang di akhir tahun 1976. Angkatan Udara kita yang mendunia terpaksa menerima nasibnya, menjadi kekuatan yang sekadar ada yang hanya mampu menjalankan fungsi angkutan udara. Di tengah keterpaksaan ini, bantuan Blok Barat dalam hal ini Amerika Serikat lewat program *Defense Liaison Group* (DLG), mengalirlah beberapa jenis pesawat termasuk jenis “tempur” tanpa senjata yaitu 16 unit pesawat T-33A serta 18 unit pesawat F-86 Avon Sabre yang datang dari Australia. F-5-E/F Tiger II yang tiba di Indonesia tahun 1980 menggantikan F-86 Avon Sabre mampu mengembalikan taring MiG-21F yang disegani era 1960-an. Selain itu datang juga sebanyak 31 unit A-4E (*single seater*) dan dua unit pesawat TA-4 H/dual seater pada era yang sama. Selanjutnya jet tempur ringan Hawk 109/209 yang memperkuat TNI AU sejak 1996 merupakan solusi dari kebutuhan akan jet tempur latihan yang simple dan praktis. Akhirnya pada tahun 1990 melalui program “*Peace Bimasena*”, TNI AU mendapatkan pesawat F-16 Fighting Falcon yang berteknologi full fly by wire yang dikendalikan komputer serta kemampuan dog fight di udara menjadikan pesawat ini terdepan di kelasnya. Dijajaran pesawat angkut pada era tahun 70-an TNI AU memperbaharui pesawat angkut C-47 Dakota dengan pesawat Fokker F-27 TS (*Troop Ship*) dari Belanda dan pesawat C-130 yang menjadikan Indonesia sebagai operator terbanyak Hercules C-130 di belahan selatan dunia. Untuk kepentingan operasi TNI juga membutuhkan unsur mobilitas udara dalam menunjang gelar misi tempur. Konsep gelaran berupa UH (*Utility Helicopter*) dipandang

yang paling ideal kala itu karena selain mampu mengangkut personel, SAR tempur, drop logistik, dan evakuasi medis, juga dituntut mampu melakukan bantuan tembakan ke permukaan. Untuk menunjang misi tersebut, ada dua jenis helikopter yang didatangkan pada tahun 1977-1978, masing-masing adalah SA-330 sebanyak 18 unit buatan Perancis dan Bell-205 A-1 untuk Angkatan Darat.⁶

4.1.3 Reformasi

Indonesia pernah berada diposisi keterpurukan yang mendalam ketika kekuatan pertahanan nasional terguncang, dimulai pasca krisis di bidang militer dan disusul dengan AS yang menetapkan embargo alutsista pada tahun 1997 kepada Indonesia hingga beberapa tahun setelah peristiwa tersebut masih berdampak. Dengan kondisi pertahanan nasional yang melemah, Indonesia merasa khawatir akan datangnya ancaman dari negara lain. Terutama negara-negara barat yang sedang bersinggungan secara langsung dengan tujuan memecah belah ketahanan nasionalisme.

Rusia hadir di tengah keadaan sulit militer Indonesia sebagai salah satu mitra kerjasama di bidang pertahanan. Jika melihat sejarah, Uni Soviet telah menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia secara bilateral. Lima tahun setelah Indonesia mendeklarasi kedaulatannya sebagai negara merdeka 17 Agustus 1945, tepatnya pada 26 Januari 1950 Uni Soviet menyatakan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia melalui fase cukup buruk di tahun 1965 setelah sekian lama berjalan baik sejak masa orde lama. Masuk pada masa pemerintahan Presiden Megawati sebagai pemimpin bangsa, Megawati dan Vladimir Putin sempat bertemu dalam sebuah pertemuan di KTT APEC (*Asia Pasific Economic Cooperation*) di Shanghai, China, pada 19 Oktober 2001. Selain itu, Menteri Luar Negeri saat itu, Hasan Wirajuda melakukan kunjungan negara ke Rusia yang disambut hangat oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Ignor Ivanov pada 27 September 2002 menjadikan kedua negara saling berdialog sehingga Indonesia maupun Rusia sepakat merencanakan kerjasama jangka panjang. Pertemuan antar Menlu menjadi momentum kebangkitan kerjasama bilateral setelah 13 tahun pasca runtuhnya Uni Soviet.

⁶ Letkol Yudi Yuliadi. "Alutsista Bergerak Milik Indonesia dalam 70 Tahun. 2015. Wira Vol 57 No 41. Kemhan Jakarta

Pertemuan kedua negara itu menghasilkan penandatanganan memorandum of understanding (*MoU*) Konsultasi Bilateral. Selain itu, Indonesia melakukan kunjunganyang diwakilkan oleh Menteri Luar Negari RI yang membahas peningkatan kerjasama dibidang perdagangan, ekonomi, dan alih teknologi.⁷

Kesepakatan di atas kemudian merambah ke sektor militer. Setelah beberapa dekade, akhirnya Indonesia menjalin kembali kerjasama militer dengan Rusia. Hal tersebut diawali oleh kunjungan Megawati ke Rusia pada 23-24 April 2003, sebagai simbol kedua negara siap untuk menjalin kembali hubungan bilateral dan saling bekerjasama di berbagai bidang. Berdasarkan catatan negara, kunjungan presiden Megawati menjadi kunjungan pertama pimpinan negara Indonesia setelah lama hubungan keduanya mendingin.⁸ Pada kunjungan Megawati ke Rusia memiliki maksud yaitu sebagai deklarasi kerjasama kemitraan Indonesia dan Rusia di abad 21 dengan dibuktikan pada penandatanganan Megawati sebagai kepala negara. Indonesia dan Rusia menandatangani pula persetujuan yang dinamakan sebagai *Agreement Between The Government of The Russian Federation on Military – Technical Cooperation* “Peretujuan Antara Pemerintah Federasi Rusia Tentang Kerjasama Teknik Militer”. Perjanjian tersebut tertulis dalam pasal 1 yang isinya antara lain: pertama, mampu menyediakan peralatan militer dan kelengkapannya; kedua, bekerjasama memproduksi dan menyediakan persenjataan dengan kesiapan mampu memperbaiki, meningkatkan serta memelihara seluruh kelengkapan militer; ketiga, dapat membantu kelangsungan aktivitas militer melalui pertukaran kerja sama di bidang strategi militer; keempat, adanya pelatihan personil berdasarkan kemampuan dan kebutuhan pihak terkait; kelima, sertifikasi mengenai persejataan yang pada pembuatannya serta bantuan secarateknis untuk pengadaan peralatan terkait produksi; keenam, kedua negara dapat melakukan kerjasama dalam produksi perlatan militer dan senjata; ketujuh, macam- macam kegiatan lain yang bersangkutan dalam pembentukan peraturan kedua pihak negara.⁹

⁷ Emilia Yustiningrum. “Enam Dekade Persahabatan Indonesia-Rusia” .//www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-Indonesia-Rusia.

⁸ Siswanto, *Dinamika Politik Internal, dan Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia Masa Reformasi*, dalam Enilia Yustiningrum, Agus R.Rahman, Japanton Sitohang, ed., *Hubungan Bilateral Indonesia- Rusia Pasca Reformasi*, LIPI, Jakarta, 2005, Hal. 47

⁹ Persetujuan antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah federasi Rusia tentang kerjasamaTeknik militer dapat diakses pada (http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/3553_RUS-2003-0012.pdf)

Rusia mulai mengirimkan pesawat tempur ke Indonesia setelah melunasi proses pembayaran ke Rusia dengan jumlah senilai 175 juta dollar AS. Proses pesawat tempur yang masuk ke dalam negeri dimulai dari empat pesawat Sukhoi (satu buah Su-27 bernilai 32 juta dollar AS dan satu buah Su 30-MK bernilai 41 juta dollar AS) ditambah dua helikopter serang transport Mi-35 (satu unit di harga sebesar 21,9 juta dollar AS) dengan seluruh pembelian unit menggunakan sistem imbal dagang. Kerjasama tersebut sempat menuai kontroversi dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang kritis serta arus defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasca adanya kontroversi, dari legislatif seperti DPR memprotes dan membentuk sebuah tim khusus untuk menyelidiki pembelian Sukhoi yang kemudian disebut sebagai *Sukhoi Gate*. Hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan Indonesia membeli pesawat tempur dengan skala besar. Komoditas Indonesia yang ditukar dalam kesepakatan imbal dagang mencapai nilai 175 juta dollar AS. Drs. Dody Rudianto, MM dan Mayjen (Purn) S. Kirbiantoro, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat pembelian SU-27 dan SU-30 MK pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia membayar uang muka 12,5 persen, pembayaran senilai 21 juta dollar melalui Bank Bukopindo. Pembayaran selanjutnya sebesar 87,5 persen menyusul dengan pembayaran melalui imbal dagang komoditas perkebunan seperti karet, sawit, tekstil dan produk lainnya selama 18 bulan sesuai kesepakatan di *MoU*.¹⁰ Menurut Siswanto, hasil kerja sama imbal dagang komoditas perkebunan Indonesia dapat dikatakan sebagai diplomasi pertahanan sekaligus ekonomi.

Adapula komoditas yang menjadi keunggulan Indonesia dapat diimplementasikan pada kerja sama imbal dagang teh, coklat, sawit, piranti, bauksit, olahan sepatu, komputer.¹¹ Siswanto menambahkan, proses kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Rusia merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas peralatan militer dalam negeri, karena Rusia dinilai memiliki keunggulan alat militer yang cukup mumpuni. Wajar Indonesia melakukan kerja sama jika melihat produksi alat militer belum mampu untuk memperkuat ketahanan nasional. Mayjen Purn S. Kirbiantoro berpendapat, dengan adanya kerja sama antara Indonesia dan Rusia di bidang pertahanan dapat menciptakan ketahanan nasional melalui

¹⁰ Mayjen (Purn) S. Kirbiantoro, Drs. Dody Rudianto, MM, Rekonstruksi Pertahanan Indonesia, Problematika, Potensi, Tantangan dan Prospek, PT Golden Terayon Press, Jakarta, 2006, Hal. 116.

¹¹ Siswanto. "Dinamika Politik Internal dan Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia Masa Reformasi". Hubungan Bilateral Indonesia-Rusia Pasca Reformasi. LIPI. 2005 Hal 47

modernisasi alutsista.¹² Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mahfud MD pada tahun 2003 mendukung arahan Megawati untuk membeli pesawat tempur dan alat militer dari produk Rusia. Menurutnya, kerja sama dalam bidang militer dengan Rusia merupakan langkah tepat agar tidak lagi tergantung pada produksi alat militer Amerika Serikat.¹³ Melihat hasil dari ketergantungan Indonesia kepada Amerika Serikat pada masa silam membuat terbatasnya ruang gerak negara dalam mengoperasikan alat militer paska embargo senjata. Indonesia mendapatkan keringanan pembayaran dalam proses imbal dagang tersebut. Kemudahan yang didapat Indonesia berupa pembelian satu helikopter dan empat pesawat Sukhoi dengan imbal dagang untuk mekanisme pembayarannya. Pada tahun 2003, Indonesia memperoleh keuntungan melalui imbal dagang dalam sistem pembayarannya sehingga nilai tukar terbilang tidak terlalu tinggi dibandingkan harga beli negara lain. Kemudian, Indonesia diuntungkan dengan mengeksport 30 komoditas yang sulit masuk ke negara di benua Eropa karena ketatnya seleksi barang impor yang masuk.¹⁴

Perihal embargo yang dijatuhkan AS terhadap Indonesia sangat mempengaruhi keadaan militer nasional. Sebagai perbandingan Rusia mempermudah Indonesia untuk membeli Sukhoi salah satunya dengan melihat Malaysia sebagai negara tetangga juga memiliki pesawat tempur Sukhoi dengan tipe yang sama, hanya saja yang membedakan adalah Malaysia membeli dengan jumlah yang cukup besar yaitu 18 pesawat SU-30 MK senilai 900 juta dollar secara *cash*. Berbeda dengan Indonesia yang memesan pesawat sejumlah empat buah, 2 unit SU-30 MK dan 2 unit SU-27 melalui sistem imbal dagang dalam pembeliannya. Menurut Valimov dari pihak Counter Trade Rosoboronexport, Indonesia menerima harga per-unit hanya sebesar 32 juta dollar AS, sedangkan Malaysia mencapai 50 juta dollar AS lengkap bersama pembaharuan mesin pesawat yang seharusnya menjadi biaya tambahan. Penjualan pesawat Sukhoi ke Indonesia merupakan bentuk implementasi dari kesepakatan kedua kepala negara. Keadaan ekonomi Indonesia yang kurang stabil menjadi alasan Rusia memberikan harga produksi murah.⁶⁶ Siswanto menyebutkan bahwa proses imbal dagang yang dilakukan Indonesia merupakan bentuk diplomasi ekonomi. Indonesia sangat membutuhkan berbagai alat militer untuk memperkuat ketahanan nasional, diplomasi

¹² Mayjen (Purn) S. Kirbiantoro, Drs. Dody Rudianto, MM, Rekonstruksi Pertahanan Indonesia, Problematika, Potensi, Tantangan dan Prospek, PT Golden Terayon Press, Jakarta, 2006, Hal. 113

¹³ Indonesia-Rusia Sepakati Kerjasama Militer. Kompas. 2003

¹⁴ Rusia Bukan Hanya Sekedar Menjual Persenjataannya, Kompas. 2003

pertahanan dan ekonomi melalui komoditas hasil bumi cocok digunakan untuk menjalin kerjasama dan memenuhi kepentingan Indonesia.¹⁵

4.2 Persepsi Ancaman

Pemahaman mengenai ancaman terlebih dahulu harus dipahami sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 4 bahwa ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. setiap ancaman akan memiliki dampak bagi suatu negara, dengan alasan ini maka ancaman menjadi poin penting dalam pertahanan negara hingga semakin krusial semenjak Perang Dunia ke I pecah dan mulai dikenalnya era *Conventional warfare* (perang konvensional) atau ancaman militer. Persepsi ancaman yang bersifat konvensional ini berkembang hingga Perang Dunia ke II dan Perang Dingin.¹⁶

Adanya ancaman jelas menyinggung keamanan nasional yang merujuk pada kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan di berbagai sektor seperti ekonomi, militer, dan politik yang juga menerapkan diplomasi. Konsep keamanan nasional Indonesia sendiri adalah suatu kondisi atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat, dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal.¹⁷

Agar keadaan itu terwujud, tentu harus ada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Doktrin pertahanan negara harus disesuaikan dengan ancaman dan cara pandang dikarenakan tindakan negara harus berlandaskan situasi dan kondisi dengan memperhatikan lingkungan strategis, ancaman nyata, dan belum nyata sehingga dapat mewujudkan keamanan nasional. Konsep keamanan nasional sendiri sudah dijabarkan dalam pembukaan UUD 1945

¹⁵ Reyhan, Muhammad. KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PEMBELIAN PESAWAT TEMPUR SUKHOI SU-35 DARI RUSIA PERIODE 2017-2019. Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021

¹⁶ Dr. Syamsunaser, S.Sos., M.M., C.FrA. Keamanan Nasional. 2022. Deepublish. Yogyakarta. Hall 25

¹⁷ Dr. Syamsunaser, S.Sos., M.M., C.FrA. Keamanan Nasional. 2022. Deepublish. Yogyakarta. Hall 27

yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya” dan dijelaskan lagi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

4.2.1 Ancaman militer

Ancaman terhadap kedaulatan negara seringkali dibatasi pada bentuk ancaman militer berupa invasi militer pada suatu wilayah yang sudah dikuasai oleh negara lain. Ancaman militer merupakan ancaman yang di dalamnya memenuhi dua kriteria secara empiris, yaitu: 1. Membutuhkan biaya yang besar, mengingat pergerakan militer memanglah sangat mahal karena aktor dibalik gerakan ini membutuhkan semua biaya pergerakan militer dan hal ini sangatlah menguras biaya negara dan 2. Pergerakan militer dapat memperlihatkan besarnya kekuatan.

Dalam strategi pada masa krisis atau perang, terdapat dua metode untuk menyikapinya yaitu metode *nonmilitary threat dan military threat model* (MTM). Kedua metode tersebut memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing karena tergantung pada besar kecilnya kekuatan yang dimiliki oleh tiap-tiap aktor. Pada metode *nonmilitary threat* baik aktor yang memiliki kekuatan besar maupun kecil memiliki risiko berperang yang tinggi dengan biaya yang besar. Berbeda dengan metode *military threat*, dalam menghadapi ancaman militer ciri utamanya adalah *endogeneous distribution of power*, di mana hasil yang diharapkan dari perang tergantung pada tindakan yang diambil aktor selama krisis. Aktor yang memiliki kekuatan yang besar mampu memobilisasi asukan militernya sehingga mampu menggertak aktor yang memiliki kemampuan di bawahnya. Dengan demikian risiko untuk timbulnya peperangan dapat menurun atau bahkan bisa tidak terjadi sama sekali.¹⁸

Bentuk ancaman semacam ini dikategorikan sebagai ancaman tradisional atau ancaman konvensional. Namun, dinamika yang berkembang pesat dalam interaksi masyarakat sangat berpengaruh pada semakin banyaknya ancaman nonmiliter dibandingkan dengan ancaman nonmiliter.

¹⁸ Dr.Syamsunasir, S.Sos., M.M., CFA. Keamanan Nasional. 2022. Deepublish. Yogyakarta. Hall 29

4.2.2 Peperangan Asimetris Sebagai Ancaman Nonmiliter

Perang identik dengan penggunaan kekuatan militer dalam mempertahankan hingga merebut kekuasaan, namun terdapat peperangan yang menggunakan kekuatan nonmiliter dan menjadi ancaman terhadap kemanan nasional yaitu peperangan asimetris. Ancaman nonmiliter mencakup pada lima aspek, yakni ideologi, politik, ekonomi, budaya sosial, dan pertahanan, dan keamanan. Peperangan asimetris merupakan peperangan yang berfokus bukan pada kekuatan militer namun fokus pada populasi atau masyarakat di mana kelima aspek dalam ancaman nonmiliter dapat dijadikan ranah perang asimetris. Terdapat beberapa contoh peperangan asimetris:

1. Terorisme
2. Radikalisme
3. Insurgency
4. Siber

Peperangan asimetris adalah salah satu bentuk perang tertua. Ini juga disebut sebagai perang kecil, konflik intensitas rendah, atau perang suku. Ada lebih 8 perang asimetris sejak Perang Dunia ke II yang diantaranya adalah konflik sipil di Somalia, pemberontakan di Chechnya atau pemebrontakan di Aljazair. Irak atau Afganistan. Istilah perang asimetris mendefinisikan konflik yang biasanya tidak mencakup kekutan pasukan militer konfrontasi tradisional.¹⁹

4.2.3 Prediksi Ancaman

Lingkungan keamanan berkembang menuju kompleksitas global dari kejadian yang tidak terduga. Hal ini ditandai dengan berbagai macam ancaman dan risiko yang ditimbulkan oleh tantangan politik dan kemanan abad ke -21. Hal ini dapat didefinisikan sebagai ancaman global, kompleks, dan multiplayer. Hal ini dicirikan oleh dinamika yang tinggi, memiliki turbulensi, dan meningkatnya keragaman aktor bersama. kepentingannya. Musuh

¹⁹ Dr.Syamsunasir, S.Sos., M.M., CFA. Keamanan Nasional. 2022. Deepublish. Yogyakarta. Hall 35

suatu negara sekarang tidak hanya sekedar bangsa tradisional tetapi juga entitas terorganisasi yang diwakili oleh *nonstate actor*, pemberontak, teroris, atau jaringan kriminal.

Tentara modern saat ini telah sangat bergantung pada kecanggihan teknologi. Tanpa instrument ini, ekonomi tidak dapat berfungsi lagi dan infrastrukturnya akan rusak. Teknologi telah menawarkan standar hidup yang tinggi kepada masyarakat hingga dimanfaatkan menjadi senjata dan dapat menjadi ancaman.

Tantangan menjaga keamanan nasional dan keutuhan negara melalui bentuk-bentuk ancaman non-militer yang bersifat kontemporer tersebut perlu diantisipasi oleh TNI sebagai alat utama negara dalam sistem pertahanan. Berkembangnya ancaman tersebut harus diimbangi dengan pengembangan sistem untuk menangkal berbagai gangguan yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. TNI sebagai komponen utama dalam menjaga pertahanan negara semakin memiliki peran penting dan vital. Sejarah panjang bangsa Indonesia telah menempatkan TNI pada peran yang tidak bisa dilepaskan dari upaya keras menjaga kedaulatan negara.

4.2.4 Tantangan dan Persepsi Ancaman Militer

Situasi nasional dalam menghadapi ancaman militer memasuki masa yang sulit dan kompleks. Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan perkembangan situasi pada abad 21, ancaman militer sangat bergantung dari adanya *volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity* (VUCA). Pada abad sekarang karakteristik perang berkembang menjadi sangat luas dan dinamis. Mesin perang menjadi semakin modern, dan teknologi informasi menjadi lebih realtime sehingga penguasa ruang tidak bisa sebatas ruang dalam artian fisik tetapi juga penguasaan ruang maya.

Perkembangan teknologi juga membuat cakupan dan areal perang menjadi lebih rumit. Terdapat perkembangan signifikan dalam seperti precision strike, di mana menembak tidak harus berada di tempat yang sama, namun bisa digerakan dengan robot. Juga berkembang information warfare di mana kekuatan radar kini bisa dengan menggunakan drone yang lebih bersifat kekinian. Dalam hal serangan juga terjadi dominating maneuvers. Dulu peralatan masih terbatas oleh medan atau kontur geografis, tetapi sekarang batas ini

ditabrak dengan peralatan-peralatan yang maju. Dari segi *space warfare*, sekarang tidak lagi hanya satelit yang digunakan namun dikembangkan peralatan yang lebih canggih. Medan perang juga sangat dipengaruhi oleh *cyber warfare*.

4.2.5 Perkembangan Sistem Keamanan Nasional

Perencanaan dan penyusunan sistem keamanan nasional yang terpadu disusun dengan memperhatikan berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat seperti halnya geopolitik dan geososial budaya. Pemahaman dan pengetahuan yang kompleks akan dinamika yang terjadi berkaitan dengan geopolitik dan geososial ini merupakan prinsip dasar dalam penyusunan kamnas dengan melihat bagaimana tujuan negara ini hendak dicapai. Penyusunan dan pembangunan sistem keamanan nasional perlu memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.²⁰

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian serius adalah melihat Indonesia sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik keberagaman. Posisi strategis Indonesia yang secara geografis berada di posisi silang antara dua benua dan samudra, dengan kekayaan sumber daya alam yang tidak ternilai harganya merupakan dua hal yang perlu menjadi perhatian. Hal ini mempengaruhi dinamika berbagai aspek kehidupan. Selain itu pandangan geopolitik, geoekonomi, dan geososial budaya secara keseluruhan menjelaskan geostrategi keamanan nasional RI.

Secara keseluruhan, terdapat tiga faktor kunci yang menjadi penentu dalam pembangunan sistem keamanan nasional, meliputi

- Sasaran strategis (*strategic objectives*), yaitu pembangunan dan penyusunan yang didasari oleh penilaian yang akurat terhadap prioritas ancaman.
- Kemampuan kamnas (kapabilitas), meliputi kemampuan dan pembangunan, pembinaan, dan persiapan kamnas.
- Anggaran yang proporsional meliputi kemampuan dalam penyusunan dan penggunaan anggaranyang efektif dan tepat sasaran.

²⁰ Juniawan Priyono & Purnomo Yugisantoro. 2017. Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi. Bogor: UNHAN. Hal 2

Dari berbagai penjelasan ini maka deskripsi sistem keamanan nasional dapat dipahami sebagai manajemen terintegrasi multiaspek dalam mewujudkan dan memelihara kepentingan nasional. Dalam upaya penyusunan dan pembangunan sistem keamanan nasional ini diperlukan sejumlah hal. Antara lain:

- Ketegasan garis batas antara pengemban otoritas politik dengan pengemban otoritas operasional.
- Mampu merespon berbagai ancaman sejalan dengan pergeseran paradig ancaman.
- Ketegasan dalam mengatur tataran kewenangan berbagai aktor kamnas atau alat negara.

Dalam hal perumusan dan pengelolaan sumber daya keamanan nasional, maka strategi keamanan nasional harus memiliki aspek tangkal yang bisa digunakan untuk merespon ancaman.²¹

4.3 Kondisi Pertahanan Indonesia saat ini



Gambar 1 : Anggaran Belanja Kemenhan. Sumber : databoks.com

²¹ ibid

Pertahanan suatu negara dalam pengertian awam sering disebut juga sebagai pertahanan nasional, biasanya mengandung pengertian segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kehormatan bangsa dan negara. Hakikat dari pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat total atau semesta, yang dalam penyelenggaraannya selalu didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Dalam buku “Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia” terbitan departemen pertahanan republik Indonesia tahun 2007 disebutkan dalam halaman 11 tentang Sistem Pertahanan Negara sebagai berikut : Sistem Pertahanan Negara adalah sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, yang menempatkan TNI sebagai komponen utama, serta segenap sumber daya nasional lainnya sebagai komponen cadangan yang berupa SDM, SDA, nilai-nilai, teknologi, dan dana didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.²²

Dalam konteks negara Republik Indonesia, bila berbicara mengenai pertahanan negara, maka secara otomatis akan menyangkut pertahanan dari suatu negara kepulauan. Dengan bentuk negara kepulauan terbesar, terletak di posisi yang sangat strategis, memiliki sumber daya alam melimpah serta berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa, maka kebutuhan terhadap satu angkatan perang yang besar dan kuat tentu saja menjadi logis.

Pertimbangan lain atas perlunya untuk memiliki satu angkatan perang yang kuat dari berbagai hal tadi adalah mengacu pada luasnya daerah kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga yang harus diawasi serta panjangnya garis pantai dari perbatasan negara. Mengacu kepada beberapa pertimbangan itu, sangat dituntut peran dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia yang mumpuni.²³

²² Departemen pertahanan. (2007). Doktrin pertahanan negara republik Indonesia. Jakarta

²³ Habib a hasnan (1997). Kapita selekta : strategi dan hubungan internasional. Jakarta. Csis

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sistem pertahanan Indonesia belum mengacu pada sistem pertahanan maritime, tetapi sistem pertahanan continental, dengan posisi angkatan darat lebih dominan. Koesnadi Kardi menggambarkan kondisi tersebut.

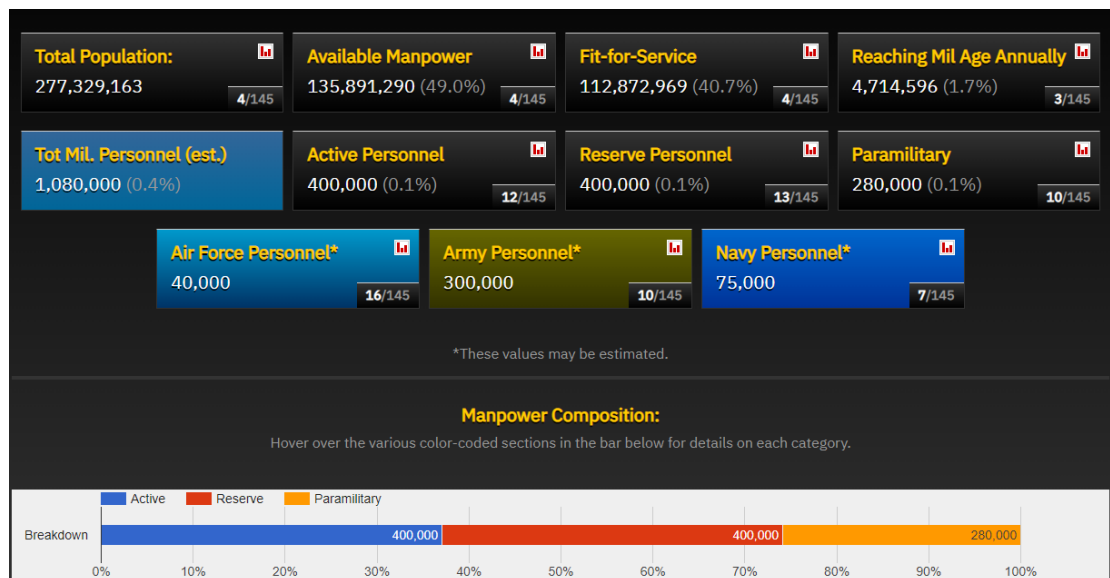
“Peran dan kemampuan TNI sampai saat ini, terutama yang menyangkut TNI AL dan TNI AU masih belum sesuai dengan porsi yang seharusnya dimiliki, sedangkan peran TNI AD dinilai cenderung melebihi porsi yang seharusnya. Mengapa kemampuan TNI AL dan TNI AU masih jauh dari harapan?. Jawabannya karena doktrin TNI yang dijadikan acuan bagi pengembangan kemampuan TNI AL dan TNI AU tidak mengakomodasi kemampuan kedua angkatan tersebut yang pada akhirnya kemampuan TNI dalam melaksanakan operasi gabungan masih jauh dari tuntutan keadaan. Sebagai contoh kemampuan dalam memberdayakan informasi yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh kekuatan udara untuk memberikan data yang akurat sebelum operasi militer dilaksanakan masih belum mampu. Kemampuan TNI dalam bidang *sea surveillance* atau *maritime surveillance* sangat lemah, sehingga pencurian sumber daya alam laut oleh nelayan asing yang setiap tahunnya berkisar \$6 miliar, TNI belum mampu mengidentifikasi bahkan mendeteksinya. Seolah-olah Indonesia yang terkenal dengan kekayaan ikan lautnya merupakan surga bagi nelayan-nelayan asing. Misalnya di perairan Indonesia bagian timur, terkenal sebagai surga bagi nelayan-nelayan dari Taiwan, Jepang, dan Filipina. Kondisi yang sangat menyedihkan tersebut akan dapat diatasi seandainya kemampuan TNI AL dan TNI AU sudah dapat ditingkatkan dan tindakan selanjutnya adalah dilaksanakannya operasi gabungan antara kekuatan laut, kekuatan udara, dan departemen terkait. Operasi seperti ini sering dilaksanakan oleh angkatan laut dan angkatan udara dari negara maritim yang telah maju”²⁴

Membangun angkatan perang adalah sesuatu yang sangat mahal. Angkatan perang tidak mungkin dibangun dengan hanya mengandalkan anggaran rutin tahunan seperti APBN, apabila angkatan perang dibangun hanya dengan dari APBN semata, maka yang terjadi adalah seperti yang dialami selama ini yaitu sulitnya mengalokasikan besaran dana yang diberikan untuk keperluan belanja senjata, dan pemeliharanya. Disini akan muncul perbandingan-perbandingan yang tidak logis. Misalnya dengan melihat besaran harga satu

²⁴ Chrisnandi, Yuddy. (2007). Kesaksian Para Jenderal: sekitar reformasi internal dan profesionalisme TNI. Jakarta: pustaka LP3es Indonesia.

pesawat tempur yang puluhan juta dolar dibandingkan dengan harga pembangunan sekolah atau rumah sakit. Demikian pula halnya dengan besaran harga sebuah kapal selam yang dibandingkan dengan harga membangun sebuah puskesmas dan lain sebagainya.

Begitu pula halnya dengan pengalokasian dana yang dibutuhkan bagi penggunaan pemeliharaan sitem senjata. Karena keterbatasan dana. Biasanya akan dialokasikan dukungan dana yang hanya dapat mendukung kebutuhan pemeliharaan sebesar 30 hingga 35 persen. Hal ini mengandung resiko, akan banyak terjadi kecelakaan dalam pengoprasian alat utama sistem senjata TNI, di samping akan mengganggu siklus latihan perorangan yang mempengaruhi kualitas keterampilan para personil yang mengawaknya.²⁵

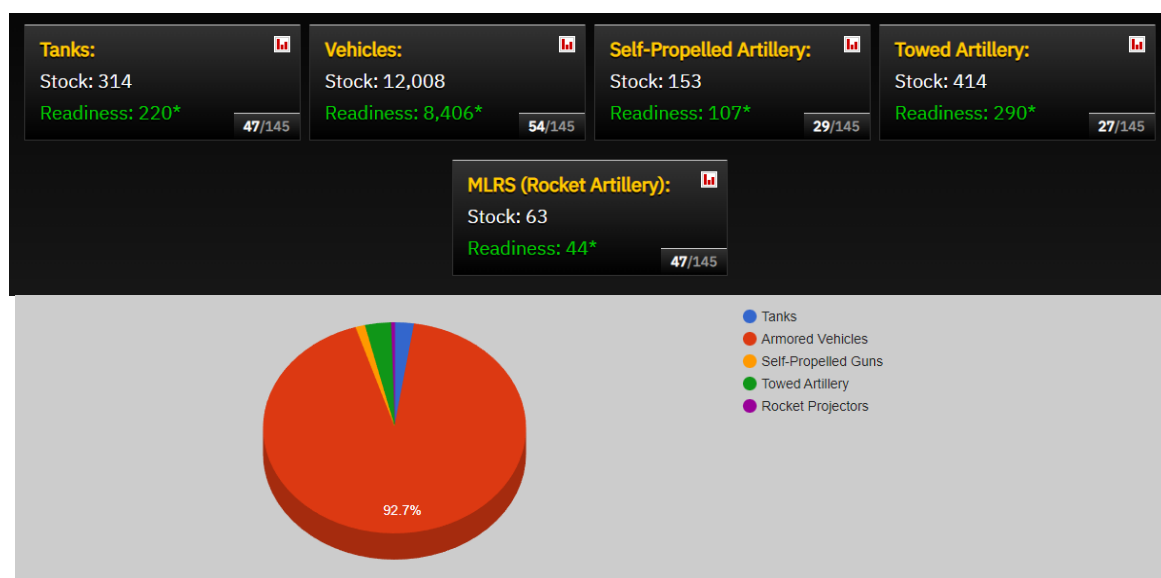


Gambar 2 : Kekuatan Personel Indonesia. Sumber : GFP 2022

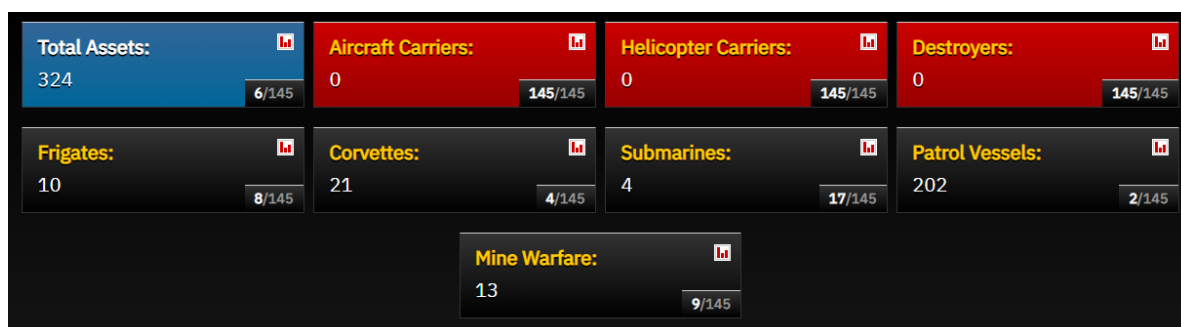
²⁵ Hakim, Chapy. (2011). Pertahanan Indonesia. Jakarta : Red & white publishing.

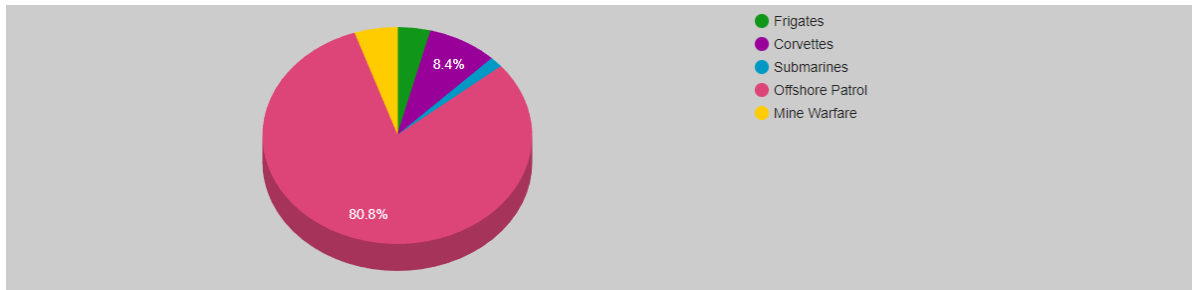


Gambar 3 : Kekuatan Udara Indonesia. Sumber GFP 2022



Gambar 4 : Kekuatan Darat Indonesia. Sumber : GFP 2022





Gambar 5 : Kekuatan Laut Indonesia. Sumber : GFP 2022

4.4 Upaya Pembangunan Angkatan Perang

Membangun angkatan perang seperti yang telah diuraikan di atas, pasti membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit karena yang dibeli bukan hanya pistol atau senapan serbu yang harga per unitnya ratusan AS, atau hanya tank kelas Scorpion yang harganya hanya di kisaran angka satu juta dolar AS, tetapi juga kapal perang dan pesawat tempur. Untuk sekedar mengetahuinya. Saat ini satu pesawat tempur F-16 harganya dapat mencapai sekitar 60 juta dolar AS atau Rp 600 miliar. Padahal membeli pesawat tempur tidak ada artinya kalau hanya membeli satu atau dua unit. Pesawat tempur baru bermakna jika dibeli untuk membentuk satu atau dua skadron. Satu skadron pesawat tempur minimal akan terdiri dari 12 atau 16 pesawat.

Demikian pula halnya dengan harga kapal perang untuk Angkatan Laut. Satu kapal korvet kelas Sigma yang baru dibeli TNI AL, dari Belanda, harganya adalah 220 juta dolar AS. Sama seperti pesawat tempur, membeli satu atau dua kapal perang tidak akan terlalu berarti dalam pembangunan sistem pertahanan suatu negara. Pengadaan armada pesawat terbang dan juga kapal perang bagi satuan armada laut, pada hakikatnya adalah pengadaan satu sistem senjata. Dia sangat bergantung kepada banyak peralatan pendukung operasi yang merupakan bagian utuh dari pesawat dan atau kapal perang. Peralatan-peralatan tersebut, tidak hanya terbatas kepada peralatan dukungan operasi dan pemeliharaan bagi pesawat dan kapal, akan tetapi juga peralatan lainnya yang dibutuhkan bagi pelatihan para sdm yang akan mengawakinya. Indonesia dengan kondisi geografisnya dipastikan memerlukan banyak

peralatan tempur terutama untuk angkatan udara dan angkatan laut sesuai dengan karakteristik negara maritim. Angkatan Udara misalnya, perlu penambahan beberapa skadron pesawat tempur untuk tugas-tugas intersepsi, pengintaian, maupun patroli udara dan maritim. Selain itu diperlukan pula satuan skadron pembom jarak jauh sebagai penumbuh *deterrence effect* di kawasan. Di sisi lain dibutuhkan pula satuan skadron angkut ringan dan angkut berat untuk pergeseran dan dropping pasukan serta kebutuhan dukungan logistik. Selain itu masih pula diperlukan satuan khusus dari jajaran skadron helikopter untuk tugas-tugas SAR dan misi-misi tertentu.

Sedangkan AL memerlukan kapal-kapal perang jenis *fregat* sebanyak 22 kapal guna mengawal 6 juta kilometer laut, 13 kapal selam untuk menjaga pintu masuk perairan Indonesia, belum lagi kapal-kapal jenis lain seperti kapal patrol, buru ranjau, juga berbagai jenis *landing ship deck/tank*, dan tentu saja kapal angkut pasukan dan logistik. Walaupun semua peralatan tersebut mahal harganya. Tetap saja harus ada upaya yang kuat untuk dapat memperolehnya, bila memang menginginkan Angkatan Perang yang kuat. Oleh karena itu setiap negara selalu berupaya untuk dapat mengalokasikan sejumlah dana bagi keperluan anggaran pertahanan dalam setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-nya.²⁶

4.5 Mengapa Diplomasi Pertahanan Dilakukan

4.5.1 Ancaman Maritim

Dalam dimensi maritim pada keamanan regional di Indo-pasifik, postur pertahanan yang efektif terpusat pada kekuatan maritim (*seapower*) dan kekuatan udara (*airpower*). Hal ini sejalan dengan pendapat prabhakar yang dituangkan ke dalam enam alasan.

Pertama, karena dampak dari transformasi pertahanan dan peningkatan teknologi militer, atau dikenal dengan istilah *Revolution in Military Affairs* (RMA). Kekuatan laut dan udara dipandang sebagai kekuatan primer dan kekuatan efektif untuk penangkalan serta proyeksi kekuatan. Dalam konteks transformasi pertahanan di Indo-pasifik, postur militer yang efektif lebih difokuskan pada platform pengangkut logistic cepat, wahana siluman,

²⁶ Surapati, Untung. (2016). Arungi Samudra Bersama Sang Naga. Jakarta. PT Elex Media

serangan presisi, *aerial early warning* (AEW), dan persenjataan terpadu dengan kekuatan laut yang menyediakan wahana mobilitas dan serangan, serta kekuatan udara untuk misi pengintaian dan penyerangan. Kekuatan darat (*land power*) akan dikerahkan manakala unsur kekuatan udara dan laut musuh sudah dapat dilumpuhkan.

Kedua, adanya kehadiran kekuatan laut asing di kawasan Samudra Hindia, Laut China Selatan, dan Pasifik Tiur terutama dari angkatan laut Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepang, Prancis, dan Inggris menyebabkan peningkatan kebutuhan interoperabilitas antara kekuatan laut negara di kawasan dan kekuatan maritim asing tersebut. Kekuatan laut di kawasan terdorong melakukan modernisasi kekuatan agar mampu bersinergi dengan kekuatan asing. Khusus untuk kekuatan Amerika Serikat, kekuatan dari Angkatan Laut AS (US Navy dan bukan dari US Air Force) yang bersifat *expeditionary forces* diproyeksikan menjadi kekuatan penyeimbang (*balancer*) di kawasan. Angkatan Laut AS menempatkan sebagian besar dari 11 armada kapal induknya untuk wilayah barat AS (yang meliputi kawasan Indo-pasifik) di bawah komando US Pacific Command.

Ketiga, modernisasi kekuatan militer China juga berdampak pada kebutuhan untuk modernisasi kekuatan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kekuatan militer China (PLA) memiliki kekuatan laut yang berdaya tempur jarak jauh (*expeditionary forces*), baik untuk kekuatan permukaan maupun kapal selam nuklirnya. Angkatan Laut China telah mengoprasikan sebuah kapal induk (kelas Lianing) yang diperkuat dengan pesawat tempur buatan sendiri, yaitu Shenyang J-15 (tiruan Su-33). Adalah hal logis jika kekuatan pertahanan negara-negara di Indo-Pasifik dibangun untuk menghasilkan daya tangkal bagi kekuatan militer China yang asertif dan semakin besar.

Keempat, isu global atas perang melawan terorisme juga membuat kekuatan militer Indo-Pasifik menyiapkan diri dalam menghadapi konflik asimetris dan berintensitas rendah. Peran pasukan khusus didukung elemen laut dan udara dianggap sebagai cara terbaik memerangi terorisme dan insurjensi. Dibutuhkan alutista khusus untuk mendukung operasi konser insurjensi seperti : helikopter serang ringan pesawat *counter insurjensi* (COIN), helikopter serbu, perahu cepat bersenjata, UAV taktikal, dan sebagainya.

Kelima, peran Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik cenderung semakin besar. AS terus menawarkan kerja sama dan penjualan persenjataan ke negara-negara di kawasan untuk mempererat hubungannya dengan negara-negara di Indo-Pasifik dalam memerangi terorisme dengan penekanan. Amerika Serikat telah mengumumkan Filipina dan Thailand sebagai mitra aliansi non-NATO pada bulan Oktober 2003. Sementara AS dan Indonesia telah membentuk kerja sama yang dinamakan *Comprehensive Partnership Arrangement* (CPA) di tahun 2010. CPA dapat dimanfaatkan sebagai koridor untuk memfasilitasi transfer dan penjualan perangkat keras (dari AS ke Indonesia). Yang perlu untuk disadari bahwa peran AS di kawasan terlalu penting dan berisiko untuk diabaikan.

Terakhir munculnya peran dan relevansi baru dari aliansi regional dan bilateral di Indo-Pasifik antara AS dan *Five Powers Defence Arrangement* (FPDA). FPDA telah menemukan landasan kerja sama baru dari kerja sama kekuatan laut dan udara Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris dalam menyatukan kekuatan dan sumber daya dalam mengimbangi Indonesia secara formal belum berubah Landasan awal FPDA ini dapat menjadi ganjalan bagi kerja sama negara-negara anggota FPDA dengan Indonesia. FPDA adalah bekas peninggalan Perang Dingin. Eksistensi aliansi itu hingga saat ini, yang awalnya dibentuk karena didorong untuk menahan Indonesia, seharusnya sudah tidak relevan lagi. Jika memang negara anggota FPDA tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman, seharusnya aliansi ini sudah dibubarkan (atau setidaknya mengikutsertakan Indonesia dalam keanggotaan FPDA).

Dalam uraian di atas, penekanan kekuatan pertahanan maritime akan mengarah pada pembangunan postur kekuatan matra laut dan udara. Sedangkan kekuatan matra darat memiliki peran strategis sebagai kekuatan matra darat memiliki peran strategis sebagai kekuatan pertahanan pesisir dan pertahanan lapis dalam atas lokasi-lokasi strategis aspek kemaritiman, seperti pelabuhan laut, pembangkit listrik, jalur utama transportasi darat, selain tugas pokoknya menjaga keutuhan wilayah daratan Indonesia secara umum. Penetapan peran angkatan darat ini memiliki nilai yang strategis untuk Indonesia, karena garis pantai Indonesia sangatlah panjang. Sehingga tugas pertahanan pesisir sudah selayaknya di sandang kepada angkatan darat yang memiliki jumlah personil yang paling banyak jika dibandingkan

dengan angkatan lain. Doktrin pertahanan pesisir yang membutuhkan sistem persenjataan khusus pun perlu untuk lebih dikaji secara mendalam.²⁷

4.5.2 Potensi Benturan Kepentingan Indonesia dengan China di LCS

Semua tawaran kerja sama dari China perlu dipertimbangkan matang-matang akan dampaknya bagi posisi maritim Indonesia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Indonesia harus memikirkan apa yang menjadi kepentingannya baik secara regional maupun secara global. Terutama tentang ASEAN, Indonesia harus mengambil sikap tegas tentang apa yang Indonesia perlukan dari ASEAN, dan jikalau memang Indonesia menganggap ASEAN vital untuk kepentingannya, maka Indonesia pun harus memperhatikan ASEAN, terutama mengenai sengketa antara negara-negara ASEAN dengan China.

Indonesia harus terus memperhatikan aspirasi negara-negara ASEAN, terutama negara-negara yang saat ini bersengketa dengan China, yakni Filipina dan Vietnam. Seperti telah dijabarkan di bagian kedua, kebijakan China yang agresif memiliki pengaruh besar kepada ASEAN dan juga kepada kalkulasi kepentingan Indonesia. Perubahan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih membuka diri untuk kerja sama dengan China belum dapat menghilangkan luka sejarah atas perilaku ekspansionis China di masa silam. Dan keterlibatan China dalam komunisme di era Orde Lama. Kerja sama dengan China selalu bersifat tidak jelas. Sebagai wujud adanya ketakutan nasional. Pihak militer Indonesia masih terus menganggap China sebagai ancaman keamanan utama bagi kedaulatan Indonesia. China dianggap sebagai negara revisionis yang tidak dapat dipercaya dan suatu saat akan memanfaatkan kekuatannya dalam mencapai kepentingan nasional.²⁸

Sengketa Laut China Selatan adalah wujud dari perilaku ekspansionis China yang berpotensi untuk meledak menjadi konflik besar. Kapal perang, kapal patrol polisi maritime, dan pesawat *patrol maritime* adalah *platform* yang kerap saling berinteraksi. Sejalan dengan UNCLOS, pihak yang berwenang dalam menjaga kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah angkatan laut. Sehingga jika terjadi konflik perbatasan wilayah ZEE, pihak

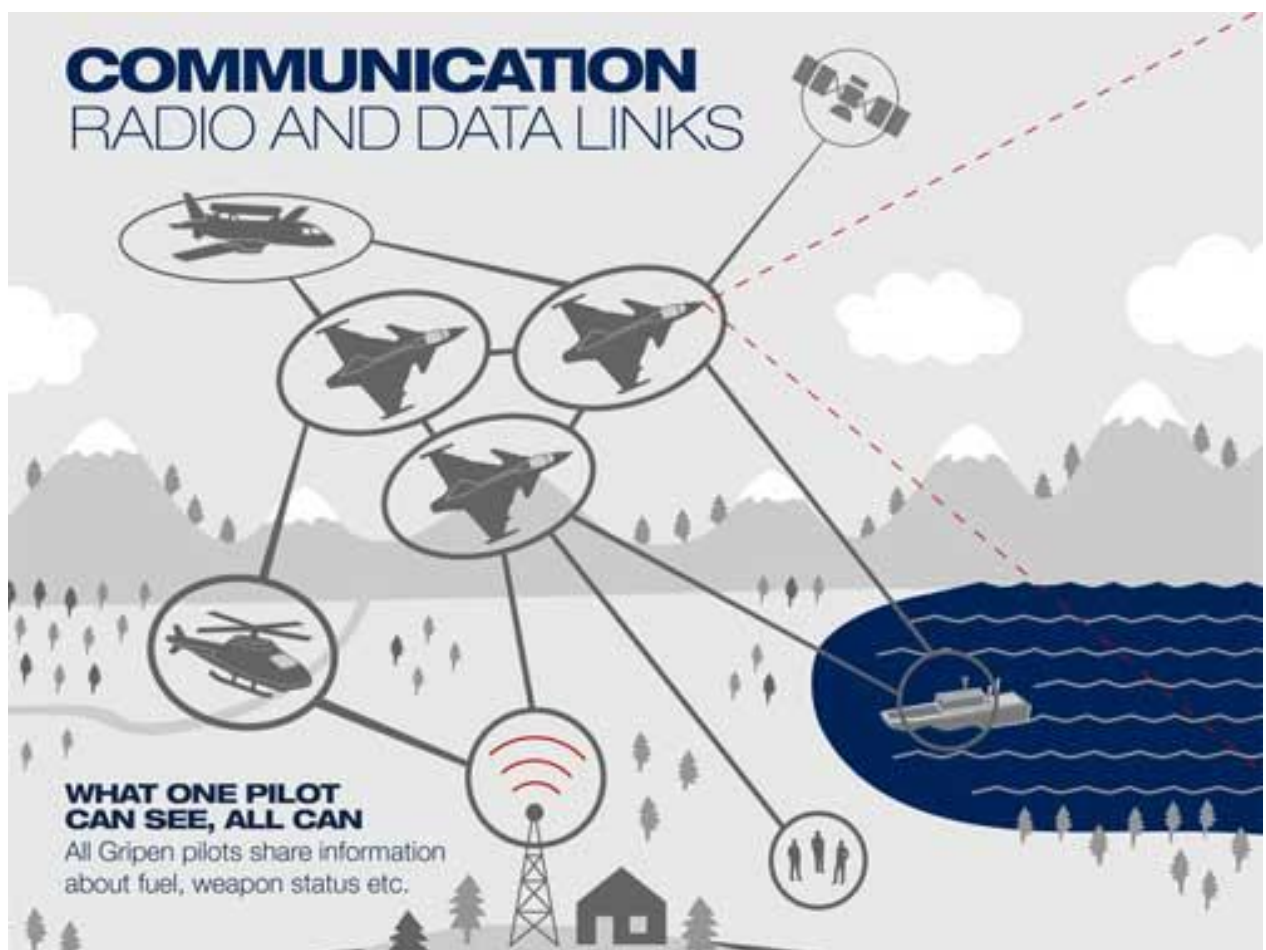
²⁷ Surapati, Untung. (2016). Arungi Samudra Bersama Sang Naga. Jakarta. PT Elex Media

²⁸ Shekar, Vibanshu. (2014). Indonesia as a Maritime Power, Jokowi Vision, Strategies, and Obstacles Ahead. www.brooking.edu

yang akan sering bergesekan adalah unit-unit kapal perang angkatan laut dari negara-negara yang bersengketa. Kapal-kapal angkatan laut tentu memiliki kemampuan untuk menghancurkan kapal lain dan menyebabkan insiden diplomatik.

Penanganan sengketa wilayah di Laut China Selatan (LCS) yang kurang bijaksana dapat menjurus kepada timbulnya konflik berskala regional. Karena itulah upaya diplomasi dan penguatan kekuatan pertahanan merupakan strategi penting yang tidak bisa ditawarkan lagi bagi Indonesia. Hampir seluruh negara di kawasan Laut China Selatan melakukan modernisasi kekuatan pertahanan.

4.5.3 Perkembangan RMA (Revolution In Military Affairs) dan Simplifikasi Perang



Gambar 6 : Interoperabilitas Militer. Sumber : Indomiliter.com

Perkembangan RMA menjadi jauh lebih signifikan pasca perang dingin usai 1990. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan unsur-unsur utama dan pendukung perang seperti *precision guided weapons, command, control, and intelligence*, ke dalam sebuah sistem tunggal.

Simplifikasi strategi perang ini mengubah lingkungan perang dunia dan juga metode peperangan konvensional. Pola-pola perang klasik yang dengan jelas menunjukkan sebuah medan perang menjadi kurang penting dibandingkan penggunaan teknologi jaringan dan komunikasi. Operasi yang dilakukan lebih fokus pada efek atau dampak yang dihasilkan, daripada menghabiskan pasukan musuh atau menguasai wilayahnya.

Sebagai contoh, daripada penggunaan kekuatan pasukan yang besar, akurasi sasaran kali ini lebih dipentingkan. Kemampuan udara pun jauh lebih meningkat, sehingga tidak perlu lagi mobilisasi kekuatan darat secara besar-besaran. Kekuatan pasukan yang dapat bergerak cepat, lebih ringan, dan dengan tidak terlalu banyak personel, dapat beroperasi lebih lama dengan tingkat akurasi yang mematikan yang lebih tinggi.

Sejarah RMA dapat dilihat dari pertengahan tahun 1970-an, saat AS mulai mengalihkan perhatiannya dari Indonesia pasca perang Vietnam, untuk kembali ke panggung Eropa. Mereka langsung menghadapi situasi strategis yang berat, yaitu kemungkinan perang nuklir dengan Uni Soviet. Jika membandingkan kekuatan pasukan konvensional, Soviet lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat.²⁹

4.6 Upaya Diplomasi Pertahanan Indonesia

4.6.1 ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)

Pada tahun 2006 dibentuk *ASEAN Defence Ministerial Meeting* (ADMM) sebagai mekanisme yang dapat digunakan sebagai wadah komunikasi terkait dengan permasalahan serta kebijakan pertahanan di antara negara-negara Asia Tenggara. Keberadaan ADMM menjadi salah satu penopang bagi terbangunnya salah satu pilar *ASEAN Community* yang akan diterapkan pada tahun 2015 yakni *ASEAN Political and Security Community* (APSC).

²⁹ Hirst, Paul. (2008). *Perang dan Kekuatan Abad 21*. Jakarta. Rajagrafindo

Salah satu dasar dalam pembentukan sebuah komunitas dalam kawasan adalah rasa saling percaya antara satu dengan lainnya. Demikian pula dalam pilar komunitas politik dan keamanan, unsur utama dalam hal ini adalah rasa saling percaya bahwa kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh sebuah negara bukan ditujukan untuk mengancam negara lain dalam komunitas tersebut. Maka dalam hal ini ADMM memainkan peranan signifikan dalam upaya untuk memperkuat pilar *ASEAN Community* dalam bidang politik dan keamanan. ADMM dalam hal ini tidak hanya memiliki signifikansi terhadap keamanan kawasan semata dalam mempercepat kohesi kawasan dan menjaga stabilitas di dalam kawasan.³⁰

ADMM menjadi sebuah instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara untuk menjalankan diplomasi pertahanan mereka. Demikian pula dengan Indonesia yang melihat bahwa keberadaan ADMM dapat menjadi sebuah instrumen strategis bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi pertahanan secara multilateral baik terhadap seluruh negara di Asia Tenggara maupun terhadap negara-negara di luar kawasan.

Menjelang pembentukan ASEAN Community yang salah satu pilarnya adalah *ASEAN Political and Security Community (APSC)* yang kemudian menghasilkan *APSC Action Plan* pada pertemuan ke 10 KTT ASEAN di Vietnam pada 2004. Dalam bidang pertahanan, ASEAN perlu untuk bekerja sama dengan menggelar pertemuan rutin melalui mekanisme *ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)*. ADMM pertama kali digelar pada tahun 2006 dengan mengambil tempat di Kuala Lumpur. ADMM merupakan kerangka untuk menggelar dialog dan mencapai kerjasama dalam bidang praktis untuk menangani masalah yang terkait dengan keamanan baik yang bersifat tradisional dan non-tradisional termasuk didalamnya adalah masalah keamanan maritim, penanganan bencana dan respon darurat, operasi perdamaian, *peace-building* pasca konflik, bantuan kemanusiaan dan kerja sama dalam bidang lainnya. Tujuan maupun mekanisme yang terdapat dalam ADMM tersebut jelas menjadi sarana bagi negara-negara di ASEAN untuk menjalankan diplomasi pertahanan dalam level regional maupun dalam level yang lebih global. Hal ini merujuk kepada kondisi dimana dalam diplomasi pertahanan terdapat beberapa aktivitas yang terkait

³⁰ Pankaj Jumar Jha, "India Defence Diplomacy in Southeast Asia", *Focus*, Vol. 5, No. 1, 2001

dengan hal tersebut di atas. Salah satunya yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan ini adalah kunjungan dari menteri dan anggota militer maupun personil sipil dalam semua level dan pembicaraan diantara staf angkatan bersenjata dalam bentuk konferensi dan seminar untuk meningkatkan kesepahaman satu dengan yang lain.³¹

Kegiatan-kegiatan tersebut yang kemudian senantiasa menjadi agenda rutin yang digelar dalam setiap penyelenggaraan ADMM setiap tahunnya. Bagi negara-negara ASEAN, ADMM akan membentuk dan meningkatkan rasa saling kepercayaan dan pengertian khususnya dalam bidang keamanan dan pertahanan sehingga tidak menimbulkan rasa saling curiga yang berujung kepada munculnya instabilitas kawasan. Selain itu dengan terbukanya ADMM, untuk masuknya partisipan dari luar dengan adanya ADMM +1 yang memayungi dialog dengan 8 mitra yang digelar di Bandar Seri Bangawan, Brunei pada Agustus 2013. Keberadaan dari ADMM + 1 ini tidak lain adalah untuk mencegah adanya kesalahan dalam realitas diplomasi pertahanan yang pada akhirnya dapat menghambat proses yang ada dalam ADMM. Selain itu, hal ini juga merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan sentralitas ASEAN dalam mengelola hubungan dengan kekuatan eksternalnya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat ASEAN dianggap sebagai mitra strategis bagi kekuatan di luar kawasan untuk mencapai kepentingan-kepentingannya khususnya dalam bidang keamanan.

Bagi Indonesia sendiri, ADMM menjadi salah satu mekanisme yang sangat efektif dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanan. Hal ini terkait dengan sifat dari ADMM yang merupakan forum multilateral yang mempertemukan sesama negara di Asia Tenggara maupun dengan negara-negara di luar kawasan melalui mekanisme ADMM plus. Indonesia memanfaatkan berbagai dialog konstruktif yang digelar untuk menyampaikan berbagai kebijakan pertahanan yang terkait dengan respon Indonesia terhadap dinamika keamanan baik yang berasal dari dalam kawasan, dari dinamika keamanan global serta dinamika keamanan domestik yang ada di Indonesia.³²

Sejatinya diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara adalah untuk menyampaikan kebijakan luar negeri terhadap negara lain demi mencapai kepentingan nasionalnya.

³¹ Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia*, (Plymouth : Rowman & Littlefield Publishing, 2009).

³² *Jurnal Pertahanan* Agustus 2014, Volume 4, Nomor 2

Demikian pula yang kemudian menjadi landasan dari dilaksanakannya diplomasi pertahanan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia telah melaksanakan diplomasi pertahanan dengan beberapa negara secara bilateral dengan strategi serta agenda yang berbeda. Bagi Indonesia, ADMM memiliki dua arti strategis yakni pertama sebagai upaya untuk mempererat hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara khususnya dalam bidang pertahanan. Kedua, untuk menjalankan peranan sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara dari masuknya kepentingan-kepentingan pihak asing khususnya dalam bidang keamanan yang bila tidak dikelola dengan baik akan mengancam kepentingan nasional Indonesia.

Diplomasi pertahanan menjadi hal yang cukup signifikan bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam membentuk arsitektur keamanan di Asia Tenggara. Kondisi ini terkait dengan permasalahan yang dalam beberapa waktu terakhir mengganggu citra dan postur pertahanan Indonesia. Permasalahan yang mengganggu citra pertahanan Indonesia adalah kurang memadainya Alat Utama Sistem Persenjataan yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan Indonesia. Indonesia yang dahulu menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara bahkan Asia, harus menerima kenyataan pahit saat ini secara kualitas dan kuantitas tertinggal dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kondisi ini tentu saja mengurangi kredibilitas Indonesia, khususnya terkait dengan peran sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini membuat Indonesia perlu untuk memperkuat kembali perannya di Asia Tenggara, khususnya dalam bidang keamanan.³³

a. ADMM Terhadap MEF (Minimum Essential Force)

Bagi Indonesia, upaya untuk membangun kembali sistem pertahanan dengan memperkuat Alutsista menjadi salah satu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi. Melalui program *Minimum Essential Forces* (MEF) menjadi upaya untuk membangun kekuatan pertahanan minimum bagi TNI pada tiga matryanya. Kebijakan ini tidak hanya dapat dilihat dalam dampak secara internal terhadap peningkatan postur pertahanan Indonesia. Namun hal ini, memiliki dampak negatif kepada negara-negara tetangga di Asia Tenggara, apabila

³³ Rusfiana, Yudi. Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Asean Defence Ministerial Meeting (ADMM). Jurnal Pertahanan Agustus 2014, Volume 4, Nomor 2

kebijakan ini tidak dikomunikasikan dengan baik terhadap mereka. Sejarah konflik yang terbentuk diantara negara-negara di Asia Tenggara sangat mungkin akan menimbulkan kecurigaan apabila negara tetangganya kemudian melakukan pembangunan sistem pertahanan dengan memperbaharui atau menambah Alutsista. Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia sebagai sebuah kebijakan pertahanan yang harus diimplementasikan untuk mengejar ketertinggalan alutsista dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, Indonesia tentu saja harus mendatangkan berbagai alutsista dari negara lain maupun dengan menjalin kerja sama pertahanan dengan negara lain demi tercapainya tujuan tersebut. Kebijakan seperti ini tidak jarang akan menimbulkan kekhawatiran dari negara lain terhadap perilaku tersebut ditujukan untuk mempersiapkan diri untuk menyerang negaranya. Terlebih mentalitas konflikatif masih sangat mungkin muncul sebagai prespektif dalam memandang kebijakan yang diambil oleh Indonesia untuk memodernisasi sistem pertahanannya tersebut.

Indonesia dalam hal ini, memerlukan dukungan dan prespektif yang baik dalam upaya mengimplementasikan berbagai program pembaharuan maupun pengadaan persenjataan untuk kepentingan pertahanan melalui platform MEF. Hal ini dapat diwujudkan melalui ADMM karena dalam hal ini, Indonesia yang kemudian diwakili oleh Menteri Pertahanan dapat menjelaskan program-program maupun platform kebijakan yang terkait dengan pertahanan yang diambil oleh Indonesia secara terbuka kepada para menteri pertahanan negara-negara Asia Tenggara dan negara luar yang berpartisipasi dalam ADMM. Penjelasan ini akan mampu untuk meredam berbagai kecurigaan dan meyakinkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara bahwa kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam bidang pertahanan bukan ditujukan untuk mengancam mereka. Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan melalui ADMM dengan tujuan untuk meredam kecurigaan dari negara tetangga mengenai kebijakan pembangunan sistem pertahanan dengan melakukan modernisasi alutsista menjadi sangat penting. Hal ini terkait dengan adanya berbagai masalah yang tergolong sensitif yang melibatkan Indonesia dengan negara tetangga yang dalam hal ini adalah Malaysia terkait dengan sengketa wilayah perbatasan. Dengan kondisi demikian kebijakan Indonesia tersebut bisa berpotensi untuk memicu terjadinya perlombaan senjata (*arms race*) di kawasan Asia Tenggara yang tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi keamanan dan stabilitas kawasan. Bila perlombaan tersebut terjadi, maka hal ini akan menjadi kemunduran bagi upaya untuk membangun komunitas ASEAN pada tahun 2015.

ADMM menjadi sarana juga bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk melakukan dan mengembangkankerja sama pertahanan diantara mereka maupun dengan kekuatan di luar kawasan.³⁴

Pengembangan kerjasama pertahanan oleh Indonesia selain dimaksudkan untuk memperkuat CBM, juga ditujukan untuk membangun dan memperkuat kekuatan pertahanan Indonesia. Kerja sama pertahanan dalam bingkai diplomasi pertahanan Indonesia, kinerjanya akan lebih optimal di kawasan bila hal tersebut disertai dukungan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pertahanan sendiri, dengan dukungan kemampuan alutsista yang baik serta dengan adanya evaluasi kebijakan kerja sama pertahanan itu sendiri. Diharapkan melalui peningkatan kerja sama pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara guna mendukung diplomasi pertahanan dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan dapat terwujud

Melalui kepercayaan yang terbangun sebagai hasil dari diplomasi pertahanan yang dilakukan dalam bingkai ADMM, Indonesia memiliki keleluasaan serta membuka peluang untuk memperkuat sistem pertahanan dengan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan mitra di kawasan maupun dengan mitra dari luar kawasan. Selain itu, ADMM dapat menjadi instrumen untuk memperkenalkan produk alutsista yang telah mampu diproduksi oleh Indonesia. Indonesia saat ini telah mampu memproduksi senjata serbu varian SS-1 dan SS-2, panser Anoa, serta Pesawat Patroli. Dalam ADMM Indonesia akan memiliki banyak kesempatan untuk menjelaskan mengenai keunggulan dari produk-produk industri pertahanan Indonesia kepada negara lain. Dengan demikian maka kesempatan untuk membuka pasar atas produk industri pertahanan dalam negeri akan lebih luas. Pembukaan pasar industri pertahanan ini akan menjadi hal yang sangat strategis karena akan menjadi prasyarat bagi perkembangan industri pertahanan dalam negeri yang saat ini tengah menjadi perhatian untuk menunjang pembangunan sistem pertahanan Indonesia.

Dengan demikian, upaya-upaya diplomasi sangat penting dalam ADMM ini, terlebih peran Indonesia sebagai negara yang memimpin usaha-usaha perdamaian dan keamanan di wilayah ASEAN dan untuk lebih meningkatkan kerja sama penyelesaian semua konflik regional, kapasitas kesenjangan, dan mengkaji kemajuan kerja sama dalam keamanan

³⁴ Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

maritim, kedokteran militer, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, operasi pemeliharaan perdamaian dan kontra-terorisme. Tidak dipungkiri bahwa ADMM bukan hanya untuk kepentingan secara eksternal yang kemudian harus dicapai oleh Indonesia didalamnya, namun juga kepentingan yang sifatnya domestik yakni keamanan nasional.³⁵

4.6.2 Kerjasama Internasional PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dalam Membangun Kekuatan Udara Nasional

PT.Dirgantara Indonesia (PTDI) sebagai salah satu industri pertahanan yang memproduksi berbagai jenis pesawat terbang untuk memenuhi pertahanan udara di Indonesia dan perkembangan akuisisi teknologinya dari waktu ke waktu. PTDI awalnya didirikan pada tahun 1976 dengan nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN), yang kemudian pada tanggal 11 Oktober 1985 berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara dan berganti nama menjadi PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) pada tanggal 24 Agustus 2000. PTDI telah melakukan beberapa tahapan akuisisi teknologi melalui kerjasama lisensi dengan beberapa negara di dunia, yakni; dari DASA (Jerman) dengan produk Helikopter NBO 105, pada tahun 1967 dari CASA (Spanyol) dengan produk pesawat sayap tetap NC-212, pada tahun 1976 dari Aerospatiale (Prancis) dengan Helikopter Puma NAS 330 dan kemudian dikembangkan Helikopter Super Puma NAS 332, dan *joint venture* antara PTDI dengan CASA yang melahirkan pesawat sayap tetap CN-235, serta kerjasama lisensi antara PTDI dengan Bell Helicopter (Amerika Serikat) dalam produksi NBell-412. Kemudian PTDI juga berhasil merancang pesawat angkut serba guna N250 pada tanggal 10 Agustus 1995 serta pengembangan pesawat jet N-2130 dengan kapasitas angkut lebih dari 100 orang.³⁶

³⁵ Salim, "Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan", dalam <http://www.pusjimarseskoal.tni.mil.id.pdf>.

³⁶ Fitria, Bilqis. ANALISIS AKUISISI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA : STUDI KASUS PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KOREAN FIGHTER XPERIMENT/ INDONESIAN FIGHTER XPERIMENT (KFX/IFX). Jurnal Pertahanan Agustus 2016, Volume 6, Nomor 2

Meskipun akhirnya kedua proyek ini pupus di tengah jalan karena di saat Indonesia sedang marak menggalakan industri pertahanan khususnya di PTDI, krisis moneter malah terjadi di tahun 1997-1998 yang sempat mematikan laju bisnis PTDI. Bencana finansial ini langsung berimbas pada kebijakan penghapusan proteksi dan subsidi untuk industri pertahanan. Apalagi IMF saat itu terang-terangan melarang Pemerintah untuk memberikan dana bantuan di saat PTDI didera pailit sehingga proyek N250 atau produksi pesawat Gatot Kaca serta pengembangan Jet N-2130 buatan anak negeri menjadi terbengkalai begitu saja.

Kemudian, sektor pertahanan Indonesia pun tengah dihujam oleh embargo yang sangat keras dari Amerika Serikat pada tahun 1999-2005. Pada saat itu, Amerika menilai bahwa tentara Indonesia sudah melakukan sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur. Di satu sisi, Embargo tersebut membuat Indonesia kesulitan untuk melakukan kegiatan *maintanance* dan memperoleh suku cadang bagi operasional kendaraan tempurnya dan di sisi yang lain, Indonesia mulai berupaya untuk melepaskan ketergantungan dari Negara lain dengan menciptakan serangkaian terobosan atau inovasi di bidang persenjataan untuk mengatasi permasalahan pelik tersebut. Pengalaman di embargo ini menjadi sebuah titik awal dalam merintis kemandirian bagi Industri Pertahanan Dalam Negeri supaya mampu berjaya di kancah nasional dan internasional.

Badai krisis yang telah menghantam negara-negara di Asia membuat PTDI dalam seketika kehilangan suntikan modal dan terpaksa memberhentikan ribuan karyawannya. PTDI dinyatakan benar-benar bangkrut. Namun, pada tanggal 24 Agustus 2000, Pemerintahan Abdurrahman Wahid mulai melakukan restrukturisasi dengan mengganti nama IPTN menjadi PTDI dan menunjuk Rizal Ramli untuk menggawangi proyek restrukturisasi PTDI tersebut agar berjalan dengan lancar. PTDI pun memperoleh 1,7 triliun konversi utang sebagai *stock* dan 13 juta dollar AS dari BPPN (Sekarang bernama Perusahaan Pengelola Asset (PPA)) dan restrukturisasi ini membuat PTDI untung tipis sebesar Rp 11 milyar. Namun, adanya perubahan manajemen pada masa 2002-2003 berujung pada PHK sebanyak 6.600 karyawannya dan krisis ini kemudian berangsur-angsur dapat teratasi dengan munculnya kepercayaan dari EADS CASA (Sekarang bernama Airbus Military) terhadap PTDI karena CASA mengalihkan produksi pesawat C-212-400 dari Spanyol ke Bandung, PTDI pun memperoleh lisensi produk C-212 dan hal itu sangat

membantu kelangsungan perusahaan yang sebelumnya mengalami kesulitan terutama segi permodalan. Kesuksesan tersebut, disusul kemudian dengan perolehan lisensi dari Bell-412 dari Helicopter Textron pada tanggal 10 Agustus 2009 dan di bulan Januari 2010, PTDI berhasil meresmikan perakitan rangka Helikopter Cougar dari Eurocopter yang menandai produksi seluruh airframe-nya di Bandung.³⁷

Selanjutnya, Airbus Military dan PPA menjalin kerjasama untuk merestrukturisasi PTDI dan tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2011, PTDI bekerjasama lagi dengan Airbus Military untuk produksi CN-295.6. Disini dapat ditelisik bahwa upaya survival dari PTDI, tak lain dikemukakan oleh penguasaan teknologi yang berkembang terus-menerus. Baik itu dengan cara memproduksi sendiri, maupun melakukan lisensi dan *joint venture* dengan Negara lain. Komponen pesawat yang mampu diproduksi PTDI, misalnya; Komponen Airbus A330, Komponen Airbus A340, Komponen Boeing 737, Komponen Boeing 747, Komponen Boeing 767 dan Komponen F-16 Fighting Falcon dan Komponen Fokker F-100. Dalam keterbatasan itu, yang dilakukan oleh PTDI adalah tetap memproduksi dan menjalankan roda bisnisnya sesuai dengan pesanan yang masuk sehingga benar-benar diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen produksi yang baik bagi PTDI agar tercapai hasil optimal.³⁸



³⁷ Herdi Sahrasad, *Teknokrasi Habibie dan Diaspora Teknologi IPTN di Amerika: Sebuah Kajian Pendahuluan*, (Jakarta: Media Institute dan LSAF, 2013)

³⁸ *ibid*

a. Program KFX/IFX

Sebelum adanya proyek kerjasama joint development pada pengembangan pesawat tempur ini, Korea Selatan dan Indonesia telah lama mengikatkan diri sebagai mitra kerjasama strategis, kedua negara sudah menandatangani *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* pada Desember 2006. Salah satu pertimbangan utama bagi Korea Selatan dalam memining Indonesia dalam pengembangan pesawat tempur adalah karena persahabatan yang sudah lama terjalin dengan sangat erat itu. Korea Selatan memandang bahwa Indonesia merupakan sebuah negara besar dengan kekayaan sumber daya dan letaknya yang sangat strategis pada peta dunia. Bagi Korea Selatan akan sangat menguntungkan apabila negaranya bisa merangkul Indonesia ketimbang negara-negara lain khususnya di kawasan Asia. Selain itu, Indonesia melalui Industri Pertahanannya, yakni PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) memiliki jam terbang yang cukup dalam memproduksi pesawat terbang. Indonesia dengan sumber daya manusianya juga mampu bersaing dalam teknologi, meskipun dinilai tidak terlalu modern. Namun bagi Korea Selatan, hal itu bisa diperbaiki dengan pengembangan dan inovasi di bidang teknologi melalui wadah di dalam kerjasama bersama ini. Gayung pun bersambut ketika Indonesia menerima tawaran bekerjasama dalam *joint development* tersebut. Hal ini telah didahului oleh sebuah *feasibility study* yang dilakukan Indonesia dengan berbagai pertimbangan utama, yakni Korea merupakan negara yang sudah cukup maju dan berpengalaman dalam membuat produk-produk industri pertahanan khususnya pesawat tempur.³⁹

Korea Selatan mempunyai Black Eagle atau Pesawat T-50 yang dibuat dengan kerjasama Amerika Serikat. ROKAF (Angkatan Udara Korea Selatan) dan TNI AU adalah pengguna pesawat ini. Selain pertimbangan itu, adanya jalinan kerjasama pertahanan yang sangat baik diantara Indonesia dan Korea Selatan. Hal ini memungkinkan terjadinya *Transfer of Technology* (ToT) bagi Indonesia. Jika ditelisik pada segi harga yang ditawarkan untuk pesawat tempur KAI KFX/IFX dinilai cukup rasional. Output produk dari kerjasama

³⁹ Chung-in Moon dan Jin-Young Lee, *The Revolution in Military Affairs and The Defence Industry in South Korea, Security Challenges, Vol.4, No.4, Summer 2008*

ini juga diharapkan bisa menggantikan pesawat tempur jenis F-5E/F Tiger yang sudah digunakan Indonesia sejak 25 sampai 30 tahun yang lalu.

Bagi Indonesia sendiri, pesawat tempur yang akan dihasilkan dengan berbagai keunggulan pada kecepatan, tingkat akselerasi dan manuver yang tinggi (*agility and maneuverability*) serta persenjataan yang serba canggih nantinya bisa menunjang serangkaian operasi penjagaan perbatasan serta melakukan surveilliance yang sangat dibutuhkan bagi Indonesia sehingga dapat meningkatkan pertahanan, disamping penguatan industri pertahanan berupa keahlian memproduksi pesawat tempur.

Bagi Indonesia, ancaman embargo dari Amerika Serikat yang pernah terjadi, memicu negara untuk senantiasa mempersiapkan kemandirian dalam industri pertahanannya dan lagi-lagi penguasaan teknologi menjadi kata kuncinya. Komponen teknologi akan menjadi faktor penting yang menunjang kekuatan pertahanan Indonesia. Penguasaan teknologi bagi PTDI saat ini bukan hanya bermain di level lisensi produk saja, tapi lebih luas lagi, PTDI juga telah menggondol reputasi yang baik dengan terlibat pada proyek mahabesar di dalam *joint development* pembuatan pesawat tempur antara Korea Selatan dan Indonesia. Dari waktu ke waktu, teknologi merupakan suatu anasir penting bagi PTDI untuk terus bergerak maju. Apabila suatu negara melakukan sendiri akan terbatas pada kemampuan dananya serta penguasaan teknologi sehingga membutuhkan pihak lain untuk berkolaborasi. Indonesia memang belum bisa membuat pesawat tempur sendiri sehingga membutuhkan mitra dalam wadah kerjasama *joint development* bersama Korea Selatan yang sudah berpengalaman dalam membuat pesawat tempur.⁴⁰

⁴⁰ Silmy Karim, *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014).



Gambar 8 : Spesifikasi IFX. Sumber : CNN Indonesia

b. Hambatan Program KFX/IFX

Permasalahan yang membelit nampaknya bukan hanya milik PTDI semata karena kerjasama joint development ini sudah melibatkan bukan hanya *Business to Business* antara PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) dan *Korean Aerospace Internasional (KAI)*, namun juga *Government to Government* antara Indonesia dan Korea Selatan. Terdapat beberapa kendala yang sangat rumit, seperti kerjasama pembuatan pesawat tempur dengan Korea Selatan ini

juga akan melibatkan Amerika Serikat karena pengembangan KFX tidak semua produknya buatan Korea Selatan. Radar, engine, maupun avionik adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan besar bernama Lockheed Martin, Amerika Serikat. Karena ada produk-produk tersebut, maka Korea Selatan diharuskan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Amerika Serikat dalam melakukan *sharing knowledge* dengan Indonesia. Selain itu, Lockheed Martin sempat meragukan Indonesia jika membeli pesawat dari kompetitornya sejak era Perang Dingin, yaitu Rusia dengan Sukhoi-nya. Disini diperlukan *political will* dari pemerintah untuk meyakinkan pihak Amerika Serikat bahwa Indonesia adalah negara netral yang tidak berpihak pada kubu manapun karena Indonesia menautkan kebijakan luar negeri yang bebas aktif (*Non-Alignment*) dan melakukan diversifikasi persenjataan sesuai dengan kebutuhan. Intervensi penuh semacam ini efektif dilakukan Indonesia ketika meminang Thales (dari Perancis) agar mau bekerjasama dengan PT. Len Industri yang sebelumnya telah memiliki riwayat bekerjasama dengan kompetitornya Aselsan (dari Turki). Dukungan penuh dari pemerintah mutlak sifatnya. Selain itu, situasi politik dalam negeri kerap kali mempengaruhi jalannya kerjasama. Penundaan demi penundaan pada proyek ini diwarnai oleh unsur politik yang cukup kuat, misalnya ketika terjadi pergantian kekuasaan dan pucuk pimpinan pada kedua negara.⁴¹

Anggaran juga merupakan kendala utama yang dihadapi karena pembiayaan pengembangan pesawat tempur ini menelan jumlah yang sangat besar kendati telah mengalami penghematan biaya dengan kontribusi sebesar 20% atau sekitar 1,6 milyar dollar. Namun nominal tersebut tetap merupakan angka yang fantastis sehingga perdebatan mengenai *guns versus butter* tidak dapat terelakkan lagi. Negara berkembang seperti Indonesia masih sangat membutuhkan banyak anggaran untuk segala bidang selain pertahanan, khususnya bidang-bidang yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat secara *riil*. Disini diperlukan koordinasi yang solid dari berbagai pihak, khususnya Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Parlemen (DPR) untuk mendukung program KAI KFX/IFX ini mengingat besarnya manfaat ekonomi yang akan diraih Indonesia di masa mendatang. Salah satunya adalah kemampuan Indonesia untuk menjual

⁴¹ Fitria, Bilqis. ANALISIS AKUISISI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA : STUDI KASUS PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KOREAN FIGHTER XPERIMENT/ INDONESIAN FIGHTER XPERIMENT (KFX/IFX). Jurnal Pertahanan Agustus 2016, Volume 6, Nomor 2

pesawat tempur-pesawat tempur ke pasar dunia yang diharapkan akan mendulang banyak rupiah bagi kas negara dan pasar ASEAN nantinya bisa menjadi peluang market yang menggiurkan dengan adanya wacana pengembangan *ASEAN Defense Industry Collaboration* (ADIC). Manfaat ekonomi dari pengembangan pesawat tempur ini lebih rinci lagi, yakni Indonesia bisa melakukan *economizing and austerity* atau penghematan biaya dari pengadaan pesawat tempur itu, yakni sebesar 55 juta dollar yang berarti harganya setengah dari harga-harga pesawat buatan Amerika Serikat maupun Eropa Barat.⁴²

Namun manfaat ekonomi dari program nasional ini perlu dibuktikan di masa depan dan hal itu sangat bergantung pada sustainability dari proyek tersebut. Permasalahan krusial mengenai ekonomi khususnya mengenai hubungan segitiga besi pertahanan perlu diperhatikan untuk keberlanjutan proyek besar ini, meskipun sudah ada Perpres yang mengatur, yakni; Perpres nomer 136 tahun 2014 tentang program pengembangan pesawat tempur KFX/IFX sebagai penjamin kontinuitas program, namun selalu ada *uncertainty* atau ketidakpastian dalam sebuah resiko. Hal tersebut harus senantiasa dapat diantisipasi.⁴³

Pesawat tempur KFX/IFX ini mempunyai *twin engine* (mesin ganda) dengan desain *single seat* (satu pilot) dan berkemampuan *stealth* (tak terdeteksi radar) di atas tingkatan Eurofighter Typhoon buatan Alenia Aermacchi, Bae Systems dan Airbus, serta Dassault Rafale buatan Prancis. Namun resiko ketertinggalan teknologi pesawat tempur KFX/IFX kerap kali menjadi perbincangan yang hangat di ruang publik karena fase pembuatan pesawat ini menelan tempo yang tidak singkat bahkan melebihi satu dasawarsa dengan target perkiraan penyelesaian pada tahun 2021 atau lebih. Pesawat tempur KFX/IFX yang tergolong ke dalam pesawat generasi 4.5 ini dianggap akan ketinggalan zaman dengan munculnya pesawat-pesawat generasi 5 yang jauh lebih canggih, seperti; Lockheed Martin F-35 Lightning II yang lebih dikenal dengan nama *Joint Strike Fighter* (JSF) yang memiliki kemampuan bermanuver yang lebih lincah, sistem terbang yang tercanggih dan mampu menjalani berbagai misi tempur atau Sukhoi T-50 Pak FA yang merupakan pesawat tempur generasi 5 buatan Rusia dengan teknologi kasat radar. Namun pesawat tempur KFX/IFX ini tetap akan memberikan benefit yang tak ternilai bagi Indonesia, selain meningkatkan

⁴² ibid

⁴³ ibid

kemampuan SDM dalam membuat pesawat khususnya pesawat tempur. Indonesia juga akan memiliki persenjataan yang lebih banyak dengan kehadiran pesawat tersebut.

Posisi Indonesia adalah untuk mempertahankan kedaulatan wilayah, tidak untuk ekspansif atau memperluas wilayah kekuasaan karena Indonesia sangat menjunjung tinggi *perpetual peace* sebagai nilai-nilai perdamaian yang dianut. KFX/IFX ini hanya digunakan sebagai efek *deterrence* atau berfungsi untuk membangun penangkalan yang efektif. Keuntungan tersebut akan dirasakan bilamana proyek ini berhasil dengan baik, terutama dari segi teknologinya. Namun saat ini, Indonesia masih menemui kendala dalam teknologi, yakni mengenai keinginan dari pemerintah Amerika Serikat yang meminta Indonesia untuk segera memiliki *Defense Technology Security System*, yakni sebuah sistem pengamanan teknologi yang apabila Indonesia mendapatkan ilmu dari Korea Selatan, Indonesia mampu meyakinkan pihak Amerika Serikat dan Korea Selatan bahwa hal tersebut tidak akan sampai bocor kepada pihak ketiga. Saat ini permasalahan tersebut masih terkendala pada keterbatasan payung hukum (*legal umbrella*) atau undang-undang yang akan mengatur serta institusi pemerintah mana yang akan menanganinya.

4.6.3 Upaya Pencarian Pengganti F-5 Tiger yang Telah Pensiun

a. kontrak SU-35

4++ generation fighter Su-35S

History

- Su-35 was developed by the Sukhoi design bureau on the basis of the Su-27 model
- Maiden flight: 1988
- Production in small numbers started in 1995
- Production suspended in late 1990s
- Production of a modernized version (Su-35S) renewed in 2006
- Maiden flight of Su-35S: 2008
- The Russian Air Force signed a contract with Sukhoi for the delivery of 48 Su-35S fighters by 2015

Armament

- Payload up to 8 tons
- 12 hardpoints for ordinance
- 30-mm internal cannon
- Wide array of air-to-air and air-to-ground weaponry

Main features

- high maneuverability
- advanced avionics and electronic systems
- Passive electronically scanned array radar with expanded range and increased number of engaged targets
- Powered by two 117S engines with thrust vectoring
- Reduced radar signature

Su-35S is a highly maneuverable multirole fighter

21,9 m
14,7 m
5,9 m

Generation:	4++
Crew:	1
Max takeoff weight:	34,500 kg
Maximum speed:	mach 2.25
Range:	3,600 km
Service ceiling:	18,000 m

RIANOVOSTI © 2011 www.rian.ru

Gambar 9 : Spesifikasi SU – 35. Sumber : rian.ru

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerjasama Ekonomi Pasifik 2014 (KTT-APEC) di Beijing, China, Presiden Jokowi mewakili Indonesia bertemu dengan Putin dan sepakat untuk menjalin kerjasama yang lebih progresif. Putin menginginkan kerjasama yang meluas dimulai dari hubungan pemangku kebijakan hingga antara masyarakat, diawali bidang ekonomi dan militer hingga ujungnya pengenalan keunggulan budaya.

Skema ini menyepakati pertukaran antara pesawat tempur Sukhoi SU-35 dengan komoditas perkebunan melalui sistem imbal dagang. Sesuai yang tertulis pada naskah tentang *offset* pertahanan sebagai salah satu jenis dalam mekanisme imbal dagang. Imbal dagang menjadi sebuah keuntungan besar Indonesia guna mensiasati anggaran pertahanan terbatas di tengah meningkatnya kebutuhan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista).⁴⁴

Pada tahun 2017, perjanjian melalui mekanisme imbal dagang antara Indonesia dan Rusia dihadapkan pada dinamika kesepakatan komoditas mana yang dapat ditukarkan. Pemerintah Rusia meminta bahan mentah karet yang hendak digunakan untuk produksi industri. Akan tetapi, sudah menjadi peraturan dasar pemerintah Indonesia sejak 2003 mengenai imbal dagang bahwasannya komoditas yang ditukarkan berbentuk hasil olahan setengah jadi bukan berbentuk bahan mentah. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pertahanan Birgjen Totok Sugiharto, kesepakatan *MoU* yang telah ditandatangani telah mengatur mekanisme imbal dagang sesuai komoditas yang dibutuhkan Rusia. Kepastian rencana Indonesia dalam memilih Rusia disampaikan secara langsung oleh Staf Ahli Menteri Pertahanan Bondan Tiara Sofyan bahwa pembelian Sukhoi SU-35 akan menggantikan peran pesawat F-5

Meningkatkan ketahanan di sektor udara bukan hanya sebuah pilihan bagi negara, melainkan menjadi kebutuhan agar dapat menstabilkan ketahanan nasional. Dalam mencapai cita-cita bangsa dan pemerintah Indonesia untuk menjadikan sektor pertahanan udara yang otonom masih jauh dari kata mampu sehingga, perlu adanya penggantian alutsista yang sudah usang seperti, pesawat tempur F-5E/ Tiger II oleh Sukhoi SU-35 Super Flanker, F-16 Viper, serta pemutakhiran armada jenis angkut berat. Kemudian, diperkuat oleh tanggapan

⁴⁴ Persetujuan antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah federasi Rusia tentang kerjasama Teknik militer dapat diakses pada (http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/3553_RUS-2003-0012.pdf)

Marsekal TNI Yuyun Sutisna, sebagai Kepala Staff Angkatan Udara, dalam melakukan kunjungan tugas beliau ke Landasan Udara TNI Iswahjudi Madiun, Jawa Timur, 18 Maret 2019, bahwa pesawat F5 Tiger II yang digunakan oleh Skadron 14 akan digantikan oleh pesawat tempur Sukhoi Su-35. Dalam melangsungkan kepentingan pertahanan Indonesia diperlukan adanya sumbangsih dari pemerintah untuk menentukan arah kebijakan pada pembentukan kekuatan militer berdasarkan pada empat indikator yaitu Teknologi Militer, Geografi Nasional, Kemampuan Musuh dan Kemampuan Organisasi Militer.⁴⁵

Kemampuan pertahanan udara melingkupi kekuatan angkatan udara, kekuatan industri nasional, teknologi, wilayah udara nasional, kekuatan angkatan satuan, mobilisasi, serta masyarakat dirgantara yang dapat berkontribusi dalam kontak senjata di udara. TNI AU patut menyadari kecenderungan yang akan mengancam di sektor pertahanan udara sehingga dapat dipahami melalui sistem pertahanan udara yang begitu dinamis.

Selain itu, kontribusi kekuatan udara sangat berpengaruh dalam mendukung kontak senjata di laut melalui keunggulannya di udara (*air supremacy*) begitupula di daratan sehingga penting bagi Indonesia meningkatkan alutsista AU. Connie Rahakundini berpendapat, kekuatan pertahanan udara dapat ditentukan melalui seberapa banyaknya jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), semisal rudal, radar, pesawat dengan awak sesuai standar pada alutsistanya, secara keseluruhan berbeda dengan kekuatan darat dan laut di mana jumlah sumber daya manusia menjadi dasar kekuatan. Beliau menambahkan, beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya peningkatan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Adapula kendalanya antara lain ialah yang pertama, belum tersedianya konsep pertahanan nasional yang begitu jelas secara hukum untuk mengatur tugas dan fungsi TNI sehingga berpengaruh kepada kebijakan yang dikeluarkan. Kedua, perihal anggaran TNI yang tidak sesuai kebutuhan, berakibat tidak maksimalnya fungsi TNI. Ketiga, penguasaan teknologi yang minim dan tingkat alutsista berkaitan dengan keterbatasan TNI.⁴⁶

⁴⁵ Astaryadi Eka, 2018, *Peran Pengawasan di Lingkungan Institusi Pertahanan dalam Rangka Mendukung Sistem Pertahanan Negara (Studi di Mabes TNI Angkatan Udara Tahun 2018)*, Jurnal Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan, Vol.4, No.2, 60

⁴⁶ Connie R. Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007,

Pesawat tempur Sukhoi Su-35 memiliki ciri khas seperti kemampuan manuver yang tinggi. Kemudian, SU-35 memberikan keunggulan dalam pertempuran udara jarak dekat dibandingkan lebih menjanjikan dari pesawat tempur modern lain, efisiensi aksi yang tinggi dalam pertempuran udara jarak jauh. Kemampuan tersebut dikarenakan radar dan sistem optoelektronik dioperasikan dengan jarak jauh, bidang pandang yang luas, dan kemampuan untuk secara bersamaan melacak sejumlah besar target, serta karena adanya rudal udara-ke-udara jarak jauh. Kemungkinan operasi grup di udara hingga 16 pesawat Su-35 dengan pertukaran informasi dan distribusi target otomatis di jaringan terminal penerbangan. Kemudian efisiensi aksi yang tinggi terhadap target darat dan laut karena akurasi tinggi dari sistem navigasi, radar dan optoelektronik dengan jarak jauh, bidang pandang yang luas dan kemungkinan penembakan beberapa target secara bersamaan.

Pesawat tempur Sukhoi Su-35 dilengkapi pula oleh berbagai macam senjata "udara-ke-udara", "udara-ke-permukaan", "Air-radar" dan "Air-kapal", sejumlah besar senjata yang ditanggihkan secara bersamaan menggunakan pemegang balok multi- tiang, peralatan radio-elektronik yang kompleks dari sebuah pesawat terbang dengan arsitektur terbuka, dikendalikan oleh sistem informasi dan kontrol tunggal, dibangun menggunakan sistem multiprosesor yang berlebihan dan saluran pertukaran informasi berkecepatan tinggi. Kemudian jarak terbang yang jauh dari pesawat tanpa tangki bahan bakar tempel karena tata letak aerodinamis dan cadangan bahan bakar yang besar, serta kemungkinan pengisian bahan bakar dalam penerbangan.⁴⁷

Dengan melihat segala keunggulan yang dimiliki oleh Sukhoi Su-35 dapat membuat Indonesia untuk mempertimbangkan pembelian pesawat karena adanya alih teknologi. Sesuai pasal 43 ayat 3 UU 16/2012 men-instruksikan bahwa setiap pembelian jenis Alpalhankam dari kerjasama luar negeri diwajibkan melibatkan Indhandalam bentuk kandungan lokal dan *offset* (KLO) ataupun alih teknologi. Kemudian ketetapan alih teknologi antara Indonesia dan Rusia diperkuat oleh Arrangement tahun 2018 sesuai kesepakatan kedua negara. Plt. Sekjen Kemhan Dr. I Wayan Midhio, M.Phil. mengharapkan Indonesia dan Rusia akan saling meningkatkan dukungan terhadap kerja sama di bidang pertahanan, Rusia yang memberikan partisipasinya dalam alih teknologi

⁴⁷ ibid

dengan melibatkan industri lokal dalam mengembangkan melalui program *offset* kepada pemerintah Indonesia.⁴⁸

Terkait optimalisasi alih teknologi yang diberikan oleh pihak Rusia dapat diukur dari kebutuhan teknis kita seperti, sebagian *special tools* yang dinilai terlalu besar kebutuhannya mengharuskan pihak Indonesia sedikit investasi atas selisihnya. Industri harus investasi mungkin atas kontrolnya yang kurang, investasi karena hitungannya sudah optimal 45% dan harus membayar penambahannya. Dengan seperti sudah terlihat jelas *demand* yang dikeluarkan saat per- 2 tahun atau jam terbang operasi per- hari atau per-minggu hingga waktu jatuh tempo.⁴⁹

Indonesia mempertimbangkan *cost dan benefit* dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35 Rusia dibandingkan membeli F-16 Viper milik Amerika Serikat. Keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia lebih banyak seperti Indonesia dapat melakukan sistem imbal dagang melalui komoditas perkebunan dan kualitas pesawat yang sama dengan negara asal, terutama tidak *downgrade*. Imbal dagang yang dilakukan dalam pembelian tersebut mencapai USD1,14 miliar atau setara Rp. 15 triliun.⁵⁰

Selain itu, mekanisme imbal dagang dapat juga meningkatkan neraca perdagangan Indonesia, dikarenakan adanya ekspor komoditas perkebunan ke Rusia. Namun, keinginan pihak Indonesia adalah menaruh harga komoditas tertinggi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang ditukarkan, dengan ini Indonesia melihat peluang untuk menjadikan kerjasama sebagai upaya diplomasi sawit.

Dalam tatanan dunia, Rusia dianggap sebagai negara yang berkompeten untuk menjalin kerjasama dengan negara di dunia terutama dalam bidang militer. Indonesia dianggap sebagai mitra penting di Kawasan Asia Pasifik oleh Rusia, maka dari itu kerjasama di bidang militer merupakan salah satu upaya meningkatkan hubungan antar negara. Indonesia sejatinya ingin meningkatkan pengaruhnya di tatanan internasional, dan

⁴⁸ Reyhan, Muhammad. KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PEMBELIAN PESAWAT TEMPUR SUKHOI SU-35 DARI RUSIA PERIODE 2017-2019. Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021

⁴⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Potensi Pertahanan Tahun 2015-2019*, Direktorat Jendral Potensi Pertahanan, Jakarta, 2019

⁵⁰ Lukman F. Djarwono, *Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia: Menuju Pemenuhan Target MEF atau Sekedar Menuju Arm Candy?*, Jurnal Defendonesia, Jakarta, 2017, Vol. 2, no. 2

dengan adanya dukungan dari pihak Rusia yang menjadikan Indonesia sebagai mitra adalah satu langkah baik untuk mencapai kepentingan nasional. Adapula gertakan dari pihak Amerika Serikat jika Indonesia tetap melangsungkan pembelian Sukhoi Su-35 ke Rusia. Rencana Indonesia membeli 11 Su-35 ini sudah berlangsung lima tahun lalu. Sejumlah pihak menuturkan jet-jet tersebut akan tiba di Indonesia pada 2019. Namun, hingga kini belum ada kepastian dari Pemerintah Indonesia apakah pembelian belasan pesawat itu dilanjutkan.⁵¹

Rusia tak menampik salah satu hambatan pembelian Sukhoi ini adalah bayang-bayang sanksi Amerika Serikat (AS). Meski begitu, Prabowo menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat sehingga keputusan apa pun tidak bisa diintervensi apalagi diancam negara lain. Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu pada akhir November lalu menuturkan akan mengkaji ulang rencana pembelian Sukhoi tersebut terutama dari sisi efisiensi anggaran dan keuntungan yang diperoleh Indonesia. Beberapa waktu sebelumnya, tepatnya di sela pameran *International Aviation and Space Show* (MAKS) 2019, Direktur Dinas Federal untuk Kerja Sama Teknis dan Militer Rusia Dmitriy Shugaev mengungkapkan kontrak pembelian 11 unit Su-35 untuk Indonesia masih berlaku.

Ancaman sanksi yang diberikan oleh negeri “Paman Sam” bagi negara yang membeli persenjataan dari Russia melalui skema *Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) memberatkan proses kelanjutan dari kontrak pembelian pesawat tersebut. Bentuk sanksi yang dapat menjerat negara-negara yang membeli alutsista dari Russia antara lain adalah larangan transaksi finansial, penghentian bantuan keuangan hingga pencekalan visa bagi individu.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengkonfirmasi bahwa pilihan pesawat baru yang akan memperkuat armada TNI-AU akhirnya mengerucut di antara dua pilihan, yaitu Dassault Rafale dan F-15EX “Eagle II”. KSAU bahkan mengatakan bahwa ‘dengan berat hati’ rencana pembelian SU-35 harus ‘ditinggalkan’. KSAU menambahkan bahwa pihak dari Boeing sebelumnya sudah pernah

⁵¹ Chandra, Gian. Prabowo Komentari Pembelian 11 Unit Sukhoi-35 senilai Rp 15,7 triliun. CNBCIndonesia. 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200206191359-4-135944/prabowo-komentari-pembelian-11-unit-sukhoi-su-35-rp1557-t>

menemuinya untuk membahas rencana pembelian F-15EX. Konfirmasi dari orang nomor satu di tubuh TNI-AU ini membuat publik berspekulasi bahwa CAATSA menjadi satu faktor yang memberatkan langkah Indonesia untuk dapat meneruskan rencana pembelian “*Flanker-E*” dari Russia.⁵²

Dalam proses transaksi pembelian alutsista dari produsen yang berasal dari luar negeri, lumrahnya terdapat informasi bahwa kontrak dinyatakan efektif apabila terdapat pinjaman dari negara produsen maupun perbankan. Berdasarkan informasi sebagaimana telah dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam Laporan Perkembangan Pinjaman, Hibah dan *Project Based Sukuk* (PBS) Triwulan II tahun 2021, tidak lagi tercatat adanya pinjaman dari Negara ataupun Perbankan Russia. Hal ini menandakan bahwa, besar kemungkinan kontrak pengadaan barang dari Russia di Indonesia saat ini tidaklah efektif, termasuk kontrak pesawat SU-35 di dalamnya. Di sisi lain, sinyal akan ketertarikan Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat tempur dari Prancis dan Amerika Serikat lebih besar dengan semakin gencarnya pertemuan yang dilakukan oleh representatif masing-masing negara produsen ke Indonesia.⁵³

Setelah 7 tahun sejak dipensiunkannya armada F-5 E/F Tiger II, hingga saat ini masih belum ada kejelasan maupun keputusan resmi terkait pesawat mana yang pada akhirnya akan diboyong oleh Kementerian Pertahanan untuk memperkuat armada Angkatan Udara di Indonesia. Apalagi, setelah upaya untuk mendatangkan pesawat Sukhoi dari Rusia terhambat karena ancaman CAATSA, padahal proses untuk mendatangkan pesawat baru memerlukan waktu hingga beberapa tahun lagi sampai seluruh pesawat yang dibeli akhirnya bisa tiba di Indonesia. Dalam proses pengadaan pesawat baru perlu juga diperhatikan kesiapan infrasktruktur ataupun pelatihan bagi para pilot atau ground *crew* yang nantinya akan bertugas untuk mengoperasikan dan melakukan Pemeliharaan serta Perawatan (Harwat) terhadap pesawat yang akan didatangkan, hal ini tentu akan memakan waktu yang tidak sebentar dan perlu persiapan matang. Bagaimanapun, Indonesia harus segera menjatuhkan pilihan dari opsi-opsi yang tersedia dengan tetap memperhitungkan kesediaan anggaran dan kesiapan unsur-unsur pendukung lainnya se-efisien dan se-efektif mungkin.

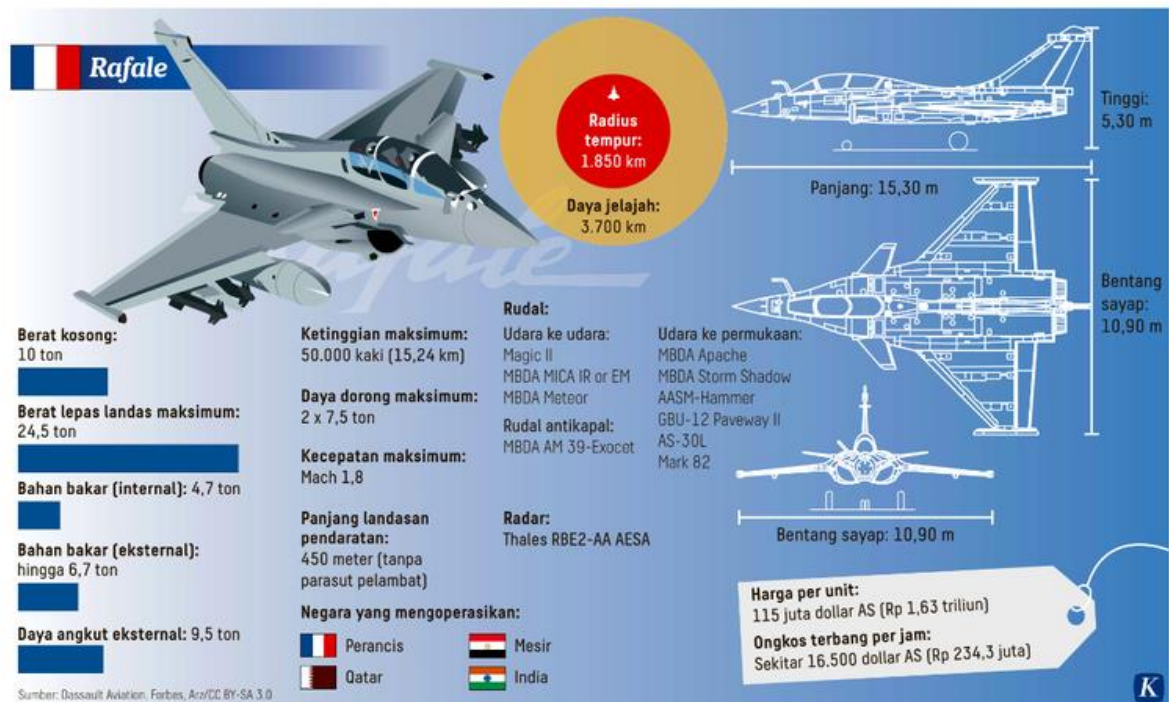
⁵² Hanif, Rahadian. Selamat Datang Rafale, Selamat Tinggal Sukhoi. Lembaga Keris net. 2022.

<https://lembagakeris.net/selamat-datang-rafale-selamat-tinggal-sukhoi/>

⁵³ ibid

Selain untuk segera mengisi kekosongan yang ada, juga untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menjawab konstelasi geostrategis kawasan yang saat ini bergerak dengan cepat dan bersifat dinamis.

b. Beralih ke Rafale



Gambar 10 : Spesifikasi Rafale. Sumber : Kompas.com

Indonesia akhirnya secara resmi menandatangani kontrak pembelian 6 unit pesawat tempur Rafale, yang akan didatangkan langsung dari Prancis. Bukan hanya 6 pesawat, Kementerian Pertahanan disebut akan menandatangani kontrak lanjutan untuk 36 unit Rafale dalam waktu dekat, yang berarti total pembelian jet tempur berklasifikasi ‘*Omnirole*’ ini oleh Indonesia akan mencapai total 42 unit.⁵⁴

Kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly ke Kementerian Pertahanan di Jakarta, pada November lalu, adalah untuk menjadi saksi penandatanganan

⁵⁴ Helvas, Alman. Langkah Prabowo Menjelang Pilpres 2024, Nasib Kontrak Rafale CS. CNBCIndonesia. 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20221017180206-14-380377/langkah-prabowo-jelang-pilpres-2024-nasib-kontrak-rafale-cs>

sejumlah kesepakatan penting antara Indonesia dan Prancis. Salah satunya adalah aktivasi kontrak pesawat tempur Rafale, yang ditandatangani oleh Dassault Aviation dan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI sebagai perwakilan dari kedua belah negara. Kesepakatan dari pembelian 42 unit pesawat Rafale oleh Indonesia mencapai nilai \$8.1 Milliar⁵⁵

Terpilihnya Rafale sebagai pesawat tempur baru untuk Angkatan Udara Republik Indonesia, merupakan sebuah angin segar. Pasalnya, tujuh tahun sudah Indonesia mengalami kekosongan armada sebab pensiunnya pesawat F-5 Tiger dari jajaran skadron Angkatan Udara, keterbatasan jumlah pesawat akhirnya memaksa Indonesia untuk segera membeli sejumlah pesawat tambahan. Adanya kepastian dari kontrak pengadaan sejumlah pesawat tempur Rafale, praktis Indonesia mengucapkan selamat tinggal terhadap pesawat SU-35 dari Rusia. Sejak lama, proses pembelian SU-35 terhambat karena adanya ancaman sanksi ekonomi dari Amerika Serikat yaitu *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA), bagi negara yang ingin membeli sistem persenjataan dari “Negeri Beruang“. Hadirnya ancaman sanksi melalui CAATSA dan tidak terjaminnya Indonesia untuk bisa mendapatkan pengabaian (*Waiver*) apabila tetap ingin melanjutkan kontrak pembelian SU-35, mengakibatkan proses penggantian pesawat F-5 Tiger yang sudah pensiun akhirnya menjadi terhenti, walaupun proses negosiasi dan komunikasi oleh Indonesia terus berlanjut.

Dilansir dari Lembaga Keris net. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, sejak dilantik pada tahun 2019, aktif melakukan safari dan penjajakan ke negara-negara Eropa, sebagai upaya untuk mencari sejumlah sistem persenjataan baru yang pas untuk bisa dibawa pulang ke Jakarta. Sejumlah pesawat pun akhirnya ‘dilirik’ oleh Menteri Pertahanan RI, baik Rafale sampai dengan Eurofighter Typhoon bekas yang rencananya akan dibeli dari Austria, di tengah ketidakpastian akan proses pengadaan SU-35 dari Russia. Ambisi besar dari Menteri Pertahanan Prabowo akhirnya membuahkan hasil, Indonesia resmi akan menjadi negara ke delapan di dunia, ke dua di Indo-Pasifik, dan pertama di Asia Tenggara yang akan mengoperasikan jet tempur Rafale produksi Prancis. Sejak adanya penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) pada tahun 2020 antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis tentang Kerjasama Peralatan

⁵⁵ ibid

Pertahanan Strategis, terdapat kesepakatan untuk saling dukung atas peralatan pertahanan di antara kedua negara, dan pesawat Rafale menjadi salah satu alutsista yang masuk dalam perjanjian. Komunikasi antara Prancis dan Indonesia selanjutnya menjadi semakin intens, dengan banyaknya kunjungan dan pertemuan yang melibatkan delegasi dari kedua negara, sertaninspeksi langsung dari pabrikan Dassault Aviation ke Indonesia untuk meninjau kapabilitas fasilitas-fasilitas yang di Indonesia yang dapat digunakan sebagai sarana overhaul dan maintenance mesin Rafale, yang akan masuk dalam rencana program *Offset Transfer of Technology* (ToT) antara Prancis dan Indonesia, menyusul kemungkinan mendaratnya sang Omnirole di Indonesia.⁵⁶

Upaya penjualan Rafale ke Indonesia oleh Prancis semakin meningkat, terlebih setelah Prancis mengalami kerugian besar akibat hadirnya AUKUS yang berdampak kepada pembatalan kontrak penjualan kapal selam diesel elektrik dengan Australia, memastikan tidak lagi mengalami kerugian terutama di wilayah Indo-Pasifik, Prancis secara aktif memperkuat upaya penjualan pesawat keunggulan negaranya ke Indonesia, peluang ini pun dimanfaatkan oleh Jakarta untuk memperkuat proses negosiasinya dengan Paris. Selain AUKUS, hadirnya ancaman nyata dari agresivitas China di wilayah Laut China Selatan memaksa Indonesia untuk segera memodernisasi alutsistanya, salah satunya adalah urgensi untuk menambah kekuatan pada sektor udara.⁵⁷

Enam pesawat yang masuk ke dalam Batch awal pembelian, diprediksi akan tiba dalam jangka waktu 56 bulan atau sekitar 4 tahun 6 bulan. Menurut Menteri Pertahanan RI, dalam waktu dekat Indonesia akan menyusul penandatanganan kesepakatan dengan Prancis untuk kontak pembelian 36 pesawat Rafale tambahan, meskipun belum jelas kapan rencana ini akan terealisasi. Mengutip dari website Dassault Aviation, penandatanganan kontrak pembelian Rafale mencakup paket komprehensif yang meliputi pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, serta pusat pelatihan dengan dua unit *Full-Mission Simulator*. Lebih lanjut, Indonesia dan Prancis juga menandatangani kerjasama program *Offset dan Transfer of Technology* antara Dassault Aviation dengan PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

⁵⁶ Hanif, Rahadian. Selamat Datang Rafale, Selamat Tinggal Sukhoi. Lembaga Keris net. 2022.

<https://lembagakeris.net/selamat-datang-rafale-selamat-tinggal-sukhoi/>

⁵⁷ ibid

4.6.4 Upaya Pembaruan Kapal Fregate TNI AL

a. FREMM dan ArrowHead



Gambar 11 : Spesifikasi FREMM. Sumber : Sindonews.com

Seiring dengan semakin memanasnya situasi di wilayah sengketa Laut China Selatan (LCS) dan semakin seringnya pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di wilayah Natuna Utara oleh kapal-kapal China, akhirnya memaksa Indonesia untuk segera melakukan modernisasi terhadap armada kapal-kapal kombatan yang dioperasikan oleh TNI-Angkatan Laut (TNI-AL). Upaya modernisasi armada TNI-AL didasari oleh hadirnya faktor ancaman di wilayah LCS, di mana agresivitas China semakin meningkat. Di sisi lain, faktor yang menjadi pendukung terhadap adanya upaya modernisasi ini adalah, banyak dari inventaris kapal kombatan TNI-AL saat ini sudah memasuki usia tua dan selayaknya diganti dengan kapal yang baru (modern).

Indonesia saat ini masih mengoperasikan sebanyak lima dari enam kapal *frigate* kelas Ahmad-Yani (sebelumnya kelas Van-Speijk) yang sudah aktif sejak tahun 1968, dengan kemampuan yang juga terbatas, kemampuan jelajah dari kapal jenis ini hanya mencapai 6.000-9.000km. Lebih lanjut, armada TNI-AL juga banyak diisi dengan jajaran kapal *korvet* kelas Parchim dari Jerman yang sudah aktif sejak tahun 80an, dan kapal-kapal tersebut sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, mengungkapkan bahwa sebanyak 22 Kapal Republik Indonesia (KRI) yang dioperasikan oleh TNI-AL saat ini sudah tidak layak operasional, dengan tambahan 3 kapal dinyatakan telah tenggelam. Kondisi dari inventaris TNI-AL saat ini mengharuskan Indonesia untuk segera membeli kapal-kapal baru sebagai pengganti untuk kapal-kapal yang sudah tua ataupun akan memasuki masa pensiun. Tentu, kualitas kapal disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi saat ini, didukung dengan persenjataan canggih yang mengikuti perkembangan teknologi, durabilitas yang lebih kuat dan juga kemampuan jelajah yang lebih jauh mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia yang perlu dilindungi. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, menyarankan agar Indonesia dapat membeli kapal dengan kemampuan “*Ocean Going*” yang artinya kapal dengan spesifikasi lebih besar dan panjang. Kehadiran kapal dengan kemampuan Ocean Going ini selain untuk memodernisasi armada TNI-AL, juga untuk melindungi aktifitas nelayan-nelayan di Natuna agar tidak perlu lagi khawatir akan tindakan China di wilayah perairan tersebut.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara jelas memiliki keinginan untuk memperkuat armada TNI-AL juga TNI-AU, di mana dalam proses nya, Menhan Prabowo telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara di Eropa dalam rangka menjalankan diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara tertentu, sekaligus ‘melirik’ beberapa pilihan persenjataan seperti kapal perang dan pesawat tempur yang dapat dibeli dan didatangkan ke Indonesia. Berfokus kepada TNI-AL, Pemerintah Indonesia berusaha memperbaharui armada-armada kapal pemukul yang beroperasi di bawah satuan-satuan komando TNI-AL. Kementerian Pertahanan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, mendapatkan alokasi sebesar Rp. 133.9 triliun, naik sebesar 13,28% dari tahun 2021 yang hanya mencapai Rp 118.2 triliun. TNI-AL sendiri tahun ini mendapatkan anggaran Rp. 24.166 triliun, yang dapat digunakan untuk kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Selayaknya, anggaran tahun 2022 dapat dioptimalkan penggunaannya, terutama pada kebutuhan Belanja Barang yang akan berdampak kepada proses modernisasi kapal-kapal TNI-AL.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia secara bertahap melakukan penggantian terhadap jajaran *frigate* kelas Ahmad-Yani yang saat ini sudah mulai memasuki masa pesiun. Dua unit kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) SIGMA 10514 buatan Belanda kemudian menjadi pilihan pertama dari Kementerian Pertahanan untuk meneruskan tugas dari *frigate* kelas Ahmad Yani tersebut, KRI-Raden Eddy Martadinata (331) kemudian menjadi *Leading Ship* di kelas nya. Indonesia kemudian menjajaki pilihan jenis *frigate* yang lain, termasuk menandatangani kontrak senilai US\$720 Juta untuk pembelian 2 unit kapal Type-31 *Frigate* atau juga dikenal dengan Arrowhead 140 dari Babcock International, Inggris. Arrowhead 140 merupakan pengembangan yang berbasis pada bentuk kapal dari *frigate* kelas Iver-Huitfeld yang diproduksi oleh Denmark, kapal ini memiliki bobot hingga 5.600 ton. Kemampuan dari Arrowhead 140 yang selain telah dilengkapi dengan Sea Captor sebagai sistem persenjataannya, juga memiliki kemampuan jelajah hingga 17,000km. Spesifikasi dari Arrowhead 140 juga nantinya akan dapat disesuaikan dengan keinginan TNI-AL sebagai pihak operasional.

Menuju Italia, Indonesia menandatangani kontrak senilai US\$ 4.5 miliar untuk pembelian 8 buah kapal perang, yang terdiri dari 6 unit kapal *multi-role frigate* jenis

FREMM dan 2 unit *Maestrals-Class frigate* yang merupakan kapal bekas pakai Angkatan Laut Italia. Kapal jenis FREMM didesain dan dikembangkan oleh galangan kapal Fincantieri, dalam jajaran AL Italia, kapal ini dikenal sebagai *Bergamini-Class frigate*. *Bergamini-Class frigate* yang dioperasikan oleh AL Italia memiliki kemampuan jelajah hingga 12,600 km, dengan bobot maksimal mencapai 6.700 ton. Sementara itu, *Maestrals-Class* merupakan kapal yang memiliki daya jelajah mencapai 11.000km dan berat total mencapai 3.040 ton.⁵⁸

Delegasi Fincantieri menyatakan, bahwa berdasarkan kunjungan yang telah dilakukan, terdapat potensi kerjasama jangka panjang di antara Fincantieri dengan PT. PAL. Perwakilan Fincantieri turut mengakui bahwa PT.PAL sudah mampu menghasilkan produk-produk alutsista kelas dunia. Kunjungan perdana Fincantieri ini besar kemungkinan sebagai tindak lanjut dari rencana pengadaan sejumlah kapal *frigate* kelas FREMM oleh Indonesia, yang kabarnya sudah ramai terdengar sejak tahun 2021.

Satu tahun yang lalu, Kementerian Pertahanan memang telah memutuskan untuk membeli sebanyak delapan unit kapal perang dari Italia, yang meliputi enam unit kapal perang kelas FREMM serta dua unit kapal *frigate* kelas Maestrals bekas pakai Angkatan Laut Italia yang telah dipensiunkan dan akan dimodernisasi. Melalui pernyataan resmi yang ditulis di halaman web milik Fincantieri, galangan kapal asal Eropa tersebut akan menjadi kontraktor utama dalam keseluruhan program pembangunan kapal perang yang dibeli oleh Indonesia, yang tentunya turut berkolaborasi dengan PT. PAL.

Fincantieri optimis bahwa program ini akan memberikan manfaat yang signifikan untuk beberapa galangan kapal di Italia selama beberapa tahun mendatang, termasuk juga perusahaan-perusahaan lain di sektor ini. Langkah pengadaan sejumlah kapal perang oleh Kementerian Pertahanan ini merupakan upaya Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan untuk memodernisasi serta pemutakhiran peralatan tempur yang dioperasikan oleh TNI-Angkatan Laut (TNI-AL). Selain Italia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Babcock International dari Inggris untuk pengadaan kapal *frigate* Arrowhead -140. Rencananya, sebanyak dua unit kapal yang

⁵⁸ Fincantieri Kunjungi PT. PAL Indonesia, Tindak Lanjut Pengadaan FREMM. . Lembaga Keris net. 2022. <https://lembagakeris.net/fincantieri-kunjungi-pt-pal-indonesia-tindak-lanjut-pengadaan-fremm/>

berbasis pada desain kapal kelas *Iver-Huitfeld frigate* dari Denmark tersebut juga akan dibangun di galangan kapal milik PT. PAL di Surabaya setelah perusahaan BUMN tersebut mendapatkan lisensi pembangunan kapal dari Babcock International.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada proses signifikan dari rencana pengadaan kapal Arrowhead -140 di Indonesia sejak penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara *Defence and Security Equipment International* (DSEI) di London, Inggris, pada 16 September 2021. Berkunjungnya delegasi Fincantieri ke Indonesia, khususnya untuk meninjau langsung fasilitas produksi kapal milik PT. PAL merupakan sebuah langkah baru dari proses kerjasama dan pengadaan kapal perang oleh Indonesia dari Italia tersebut. Walaupun upaya realisasi pembangunan sebanyak delapan kapal perang FREMM di Indonesia, akan memerlukan sarana dan pra-sarana yang mumpuni serta dukungan finansial yang cukup.